© HAK CIPTA MILIK UNIVERSITAS ANDALAS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

IDENTIFIKASI KECAMATAN RAWAN PANGAN DAN PENYEBABNYA DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

SKRIPSI

RIYANDHI PRAZA
02114015

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010

Alhamdulillahhirabbil'alamin

Hanya dengan izin-Mu ya Allah Sang Maha, akhirnya sedikit tugas dapat diselesaikan. Engkau berikan jawaban untuk setiap do'a di fardhu dan sunnahku. "Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan maka bekerja keraslah dalam urusan yang lain. Hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap". (Q.S. Al-Insyirah : 6-8)

Dengan mengharapkan Keridhaan Allah SWT izinkanlah hamba mempersembahkan karya kecil ini sebagai ungkapan kasih sayang dan terima kasih ku atas doa, kasih sayang, bimbingan, dorongan semangat dalam mengiringi langkah ku demi meraih cita-cita yang luhur ini, yang ku cintai Bapakku H. Mardi, SKM dan Ibuku Hj. Meriaty, Amd.

Terimakasih kepada adik-adikku yang juga banyak mengingatkan dan memberi semangat yakni Ade Indra Praza, Irma Tri Wahyuni dan Rahmi Delfiana

Rasa hormat dan terimaksih yang seluas-luasnya Kepada Bapak Prof. Rudi Febriamansyah dan Bapak Cipta Budiman, Ssi, MM yang telah memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini. Kepada Bapak Dr. Endry Martius dan Bapak Dr Faidil yang telah banyak membantu dalam banyak hal kepada penulis agar penulis dapat juga meraih gelar Sarjana Pertanian ini.

Buat sahabat dan teman yang pernah bersama saya melewati masa-masa indah dan penuh sensasi dalam dunia gerakan : Indrayadi, Delfi, Yendra, Bang Andi, Mas Eko, Dayat, Eko Fir, Asmidar, Makasih untuk semua yang telah kita lewati bersama

Terimakasih kepada Adinda Bancin (Sosek 05) yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi ini..maaf banyak merepotkan ya dan cepat tamat...

Kepada adik2 junior yang juga banyak membantu, Dhana, Iwit, Aminah, Hanum, Adja, Slamet, Riyan, Arif dan yang lainnya, thanks ya..

Buat adik-adik Wisma Negarawan : Budi, Yudi, Fadli Adha, Fadli Irawan, Yuda, terimaksih juga atas bantuannya..dan cepat selesai ya..

BIODATA

Penulis dilahirkan di Sibolga, Sumatera Utara pada tanggal 2 Agustus 1984 sebagai anak pertama dari empat bersaudara, dari pasangan H. Mardi, SKM dan Hj. Meriaty P, Amd. Pendidikan Sekolah dasar (SD) ditempuh di SDN 17 gunung Pangilun Padang lulus tahun 1996. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) ditempuh di SLTPN 12 Padang, lulus tahun 1999. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas ditempuh di SMU Negeri 3 Padang, lulus pada tahun 2002. Pada tahun 2002 Penulis diterima di fakultas Pertanian Universitas Andalas Program Studi Agrobisnis.

Padang, Mei 2010

Riyandhi Praza

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah Subhanahuwata'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang berjudul " Identifikasi Kecamatan Rawan Pangan dan Penyebabnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai ".

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya Kepada Bapak Prof. Dr. Rudi Febriamansyah, Msi selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Cipta Budiman, Ssi, MM selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk, saran dan pengarahan dari penyusunan proposal, penelitian sampai penyusunan skripsi. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada Ketua dan Sekretaris Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, seluruh Dosen, karyawan Fakultas Pertanian yang telah memberi dorongan, semangat dan bantuan yang berharga selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang. Penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada kedua orang tua yang telah memberi semangat, dorongan dan do'a kepada penulis, sehingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Pertanian Universitas Andalas ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat berharap kritikan dan saran dari pembaca untuk perbaikan di masa datang. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu pertanian khususnya.

Padang, Mei 2010

RP

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Lampiran .	vi
Abstrak	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3.Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pangan	7
2.2 Pentingnya Ketahanan Pangan	10
2.3 Kerawanan Pangan	15
2.4 Analisis Ketahanan Pangan	17
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	19
3.2 Metodologi Penelitian	19
3.3 Pengumpulan Data	19
3.4 Jenis dan sumber Data	20
3.5 Variabel Yang Diamati	20
3.6 Analisa Data	26
BAB IV. Hasil Dan Pembahasan	
4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian	30

4.2 Identifikasi Sebaran Keadaan per Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai 33

4.3 Identifikasi Faktor Penyebab Kecamatan Rawan Pangan 48

BAB V. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan 52

5.2 Saran 52

Daftar Pustaka 53

Lampiran 54

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Tabel Perkembangan Produksi Pangan Secara Nasional 200-2004 9
2. Tabel Penyusutan dan Konversi Bahan Pangan Pokok di Kabupaten Kepulauan Mentawai 22
3. Tabel Produksi padi, jagung dan umbi-umbian di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2004-2006 33
4. Tabel Produksi sagu, pisang dan keladi di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2004-2006 33
5. Tabel Ketersediaan bersih beras, jagung dan umbi-umbian Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2004-2006 35
6. Tabel Ketersediaan sagu, pisang dan keladi Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2004-2006 35
7. Tabel Ratio konsumsi normatif terhadap ketersediaan pangan pokok Serta indeknya 39
8. Tabel Penduduk miskin tahun 2006 40
9. Tabel Penduduk tanpa akses listrik tahun 2006 40
10. Tabel Desa tanpa akses jalan yang memadai 41
11. Tabel Persentase Rumah Tangga tanpa akses air bersih tahun 2006 42
12. Tabel Angka harapan hidup Tahun 2006 43
13. Tabel Berat badan Balita di bawah standar tahun 2006 43
14. Tabel Angka kematian bayi tahun 2006 44
15. Tabel Perempuan buta huruf tahun 2006 45
16. Tabel Data indikator kerawanan pangan tahun 2006 47
17. Tabel Indeks komposit kerawanan pangan tahun 2006 48

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Kerangka Sistem Ketahanan Pangan 14

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Kabupaten / Kota yang Termasuk Daerah Rawan Pangan	55
2. Data indikator Kerawanan Pangan	56
3. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kabupaten / Kota Tahun 2005	57
4. Indeks Komposit Kerawanan Pangan (IFI) Kabupaten Tahun 2004	58
5. Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga dan Kepadatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2006	59
6. Penghitungan Penyusutan Masing-Masing Bahan Pangan	60
7. Penghitungan I_{AV} masing-masing Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai	70
8. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2006	71
9. Banyaknya Pelanggan (Rumah Tangga) Yang mendapat aliran PLN Tahun 2006	72
10. Jumlah Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten kepulauan Mentawai Tahun 2006	73
11. Banyaknya Rumah Tangga Tanpa akses air Bersih	74
12. Status Berat Badan Balita Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2006	75
13. Jumlah Kelahiran dan Kematian Bayi Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2006	76
14. Persentase Penggunaan Lahan Menurut Jenis Penggunaannya di Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2006	77
15. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi dan Jenis KelaminDi Kecamatan Siberut Utara Kabupaten kepulauan Mentawai tahun 2006	78

" IDENTIFIKASI KECAMATAN RAWAN PANGAN DAN PENYEBABNYA DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI"

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul " ***Identifikasi Kecamatan rawan Pangan dan Penyebabnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai".*** Tujuan Untuk 1). Mengidentifikasi sebaran keadaan pangan per Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2). Mengidentifikasi penyebab rawan pangan di Kecamatan paling rawan pangan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Nazir (1999) metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti kasus sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari wawancara langsung dengan para key informan, sedangkan data sekunder diiperoleh dari publikasi yang dilakukan melalui Pemerintah, baik Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Propinsi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Kecamatan paling rawan pangan di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah Kecamatan Siberut Utara. Dari 10 indikator yang digunakan dalam penentuan Kecamatan rawan pangan ini ada 7 indikator dominan yang menjadikan Kecamatan Siberut Utara menjadi Kecamatan rawan pangan, yakni : indeks ketersediaan pangan, indeks penduduk miskin, indeks desa tanpa akses jalan yang memadai, indeks penduduk tanpa akses listrik, indeks umur harapan hidup, indeks berat badan balita di bawah standar dan indeks perempuan buta huruf.

Adapun faktor penyebab Kecamatan Siberut Utara menjadi Kecamatan rawan pangan adalah karena faktor geografis dari daerah tersebut yang menjadikan pendayagunaan lahan tidak optimal dan mengakibatkan tidak sampai akses berupa kesehatan, jalan dan sebagainya ke masyarakat yang jauh dari Ibukota Kecamatan. Faktor lainnnya adalah faktor Sumberdaya manusianya yang umumnya berkualitas rendah dimana hal ini dikuatkan dengan tingkat pendidikan masyarakatnya yang sebagian besar hanya sampai SD saja, sedangkan yang tamat SLTP ke atas jumlahnya hanya 17,6 % dari total jumlah penduduk di sana. dan juga faktor Kebiasaan masyarakat disana yang manjadi penghambat majunya daerah tersebut.

Untuk menanggulangi rawan pangan di Kecamatan Siberut Utara disarankan, 1).Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana untuk meningkatkan aksesbilitas wilayah, 2). Tinjau ulang bantuan bahan pangan berupa beras karena kurang sesuai dengan pola konsumsi masyarakat setempat, bantuan tersebut mungkin dapat dilaihkan dalam bentuk uang atau berupa pangan sumber protein agar lebih membantu meningkatkan keseimbangan konsumsi (gizi), 3). Peningkatan pemberdayaan kelembagaan / program terkait pangan, gizi dan kesehatan.

.

Daftar bacaan : 19 (1982 – 2007)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memantapkan ketahanan pangan merupakan prioritas utama pembangunan, karena pangan merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia. Ketahanan pangan sangat erat kaitannya dengan ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan keamanan atau ketahanan nasional (Suryana, 2001). Kejadian rawan pangan dan gizi buruk mempunyai arti politis yang negatif bagi penguasa. Sejarah membuktikan bahwa di beberapa negara berkembang krisis pangan dapat menjatuhkan pemerintahan yang sedang berkuasa (Purwantini, 2002).

Kelaparan adalah suatu perwujudan yang ekstrim dari peristiwa kerawanan pangan secara berkepanjangan atau tiba-tiba. Kerawanan pangan terjadi bila seseorang kekurangan gizi yang disebabkan tidak tersedianya pangan (secara sementara atau terus menerus), kurangnya akses sosial atau ekonomis terhadap pangan yang cukup, dan atau konsumsi serta penyerapan bahan pangan yang tidak memadai. Rawan pangan dapat merupakan suatu fenomena jangka pendek (sementara) yang timbul karena bencana, atau suatu masalah jangka panjang (kronis) yang disebabkan oleh keterbelakangan kondisi sosial ekonomi yang tidak menguntungkan (Anonim(a), 2004).

Suatu wilayah yang terjamin pangannya pada saat ini dapat menjadi rawan pangan di masa yang akan datang, bila sumber daya alamnya tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Jaminan pangan pada tingkat makro, dalam hal swasembada pangan di tingkat nasional dan sub-nasional, tidaklah secara otomatis memberikan garansi terhadap jaminan pangan ditingkat rumah tangga dan individu. Oleh karena itu, rawan pangan merupakan suatu isu multi dimensional dan memerlukan tinjauan yang lebih cermat terhadap sekumpulan parameter, melampaui tinjauan hanya terhadap produksi dan ketersediaan pangan.

Belum tercapainya kecukupan pangan di tingkat individu dapat menimbulkan kerawanan pangan. Kerawanan pangan dapat disebabkan ketidakmampuan dalam memperoleh pangan yang cukup, yang terjadi karena ketidakstabilan harga, ketidakstabilan pendapatan rumah tangga, serta ketidakstabilan produksi pangan di wilayah tertentu.

Hal ini menggambarkan bahwa walaupun secara makro tingkat ketahanan pangan nasional memadai, namun secara mikro ketahanan pangan sebagian penduduk di wilayah Indonesia masih rentan. Hal ini apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat, akan berdampak pada pembentukan generasi lemah fisik maupun mental di waktu yang akan datang (Suyana, 2003). Kerawanan pangan merupakan masalah multi-dimensional yang mana secara umum dapat didefenisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif, baik secara sementara maupun lama. Kondisi ini bisa saja sedang terjadi atau berpotensi untuk terjadi.

Kerawanan pangan di tingkat nasional dapat disebabkan oleh ketidakmampuan untuk menghasilkan pangan dan padi-padian secara cukup atau akibat ketidakmampuan untuk mengimpor pangan yang memadai. Pada tingkat propinsi, kerawanan pangan dapat disebabkan oleh kurangnya produksi atau distribusi pangan yang memadai ke seluruh pelosok dengan harga yang terjangkau. Kerawanan pangan di tingkat rumah tangga umumnya disebabkan oleh kurangnya kesempatan memperoleh nafkah yang mencukupi serta tingginya harga pangan. Berdasarkan Laporan Kerja Badan Bimas Ketahanan Pangan Departemen Pertanian RI tahun 2004 terlihat pada Propinsi Sumatera Barat dalam rentang waktu 2001-2003 mengalami tingkat rawan pangan sebesar 6,67%, pada tahun 2001 angka rawan pangan sebesar 28,57% kemudian pada tahun 2002 terjadi penurunan hingga mencapai 6,67% dan pada tahun 2003 mengalami peningkatan lagi menjadi 13,33% (Lampiran 1).

1.2 Rumusan Masalah

Kerawanan pangan dapat bersifat kronis ataupun sementara (transien). Kerawanan pangan kronis dapat disebabkan oleh satu atau beberapa faktor seperti ketidakmampuan untuk mengakses pangan yang cukup seperti dari swasembada, pembelian di pasar, pinjaman atau bantuan. Kondisi ini dapat juga disebabkan oleh ketidakmampuan untuk mengasimilasikan pangan ke dalam tubuh, cara makan yang tidak benar, infrastruktur kesehatan dan sanitasi yang tidak memadai, dan lain-lain. Dilain pihak kerawanan pangan yang bersifat sementara (transien), merupakan dampak dari menurunnya ketersediaan pangan secara mendadak dan sementara, yang umumnya disebabkan oleh bencana alam.

Berdasarkan Badan Bimas Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat (2006) terlihat bahwa Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan daerah yang tergolong kawasan rawan pangan terlihat bahwa rendahnya ketersediaan pangan pokok /kapita/hari di Kabupaten Kepulauan Mentawai ini yaitu sekitar 87,67 gram, sementara Kabupaten Solok memiliki ketersediaan pangan yang paling tinggi di Sumatera Barat yaitu 1.281,28 gram. Disamping itu, Kabupaten Kepulauan Mentawai juga memiliki penduduk miskin yang paling tinggi dibanding daerah lain di Sumatera Barat di mana mencapai 80,13% (Lampiran 2).

Pengurangan kemiskinan dan rawan pangan, serta pengurangan kesenjangan di tingkat daerah merupakan tantangan yang besar bagi para perencana dan pembuat keputusan. Satu aspek penting dari tantangan ini adalah sifat heterogen spasial : orang-orang miskin cenderung untuk berkelompok ditempat-tempat tertentu. Data agregat tingkat nasional tidak memperlihatkan variasi sub-nasional ini. Pada kenyataannnya, penjabaran data kemiskinan/kerawanan pangan pada tingkat yang lebih rendah akan dapat memperlihatkan bagaimana suatu wilayah yang terlihat baik pada tingkat agregat, ternyata memiliki daerah daerah yang tertinggal.

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan daerah yang memiliki luas wilayah yang paling luas dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki luas daerah sebesar 6.011,35 Km^2 dengan jumlah penduduk sekitar 70.436 orang. Sementara Kabupaten Solok yang

diidentifikasikan tersedia pangan hanya memiliki luas wilayah 57,64 Km^2, dan terdiri dari 54.049 orang (Lampiran 3).

Tantangan dalam mengurangi jumlah penduduk yang kelaparan dan malnutrisi membutuhkan pemantauan yang berkesinambungan. Hal ini dapat dipantau pada tempat-tempat yang sudah diidentifikasi sebagai daerah rawan pangan dan kelaparan. Bila titik-titik rawan pangan sudah dapat diidentifikasi, maka penyebab masalah kerawanan pangan pada penduduk di daerah tersebut harus diketahui dengan cara yang tepat. Titik-titik rawan pangan tersebut dapat diidentifikasi melalui analisa data yang tersedia pada berbagai tingkatan.

Pemetaan, pemaparan dan analisis indikator-indikator secara spasial menjadi suatu instrumen yang semakin penting untuk menyelidiki serta mendiskusikan masalah-masalah sosial, ekonomi dan lingkungan. Para pembuat keputusan memerlukan alat informasi untuk secara cepat mengidentifikasi daerah-daerah yang kurang beruntung, dimana investasi dari berbagai pelayanan dan infrastruktur harus memberikan dampak paling besar dalam peningkatan kondisi kehidupan kaum miskin dan yang tertinggal, yang dicerminkan melalui parameter-parameter ekonomi (Anonim(a), 2004).

Kerawanan pangan merupakan manifestasi dari ketersediaan pangan, akses terhadap pangan dan nafkah, pemanfaatan/absorbsi pangan dan kerentanan pangan. Interaksi dari keempat dimensi dimensi tersebut pada akhirnya menentukan apakah suatu wilayah atau individu mengalami rawan pangan. Penanganannya harus didukung secara optimal melalui kebijakan, pemantauan, analisis dan evaluasi faktor-faktor penyebabnya, serta dilanjutkan dengan perumusan strategi dan penyusunan program kegiatan pencegahan dan penanggulangan masalah.

Agar penanganan masalah kerawanan pangan dapat lebih terfokus, perlu adanya suatu alat pemantauan dan analisis rawan pangan, dalam memberikan informasi bagi pengambilan kebijakan di tingkat Kabupaten maupun Propinsi agar mampu menyusun perencanaan yang lebih baik dan tepat sasaran, efektif dan efisien. Yaitu dengan cara pemetaan kerawanan pangan.

Pemetaan kerawanan pangan pada tingkat Propinsi memperhatikan pentingnya fasilitas penyusunan strategi yang sesuai dalam menangani masalah kerawanan pangan jangka menengah dan jangka panjang. Sehingga pemetaan ini dapat membahani para pengambil keputusan ditingkat Kabupaten maupun Propinsi untuk menghasilkan perencanaan yang baik dan sasaran program jaring pengamanan sosial serta membantu perencanaan mitigasi bencana, kesiapan serta upaya pemulihan.

Sejalan dengan desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah terjadi perubahan dalam penentuan prioritas program pada tingkat wilayah khususnya pemerintah tingkat kabupaten/kota. Perubahan ini secara tidak langsung mempunyai dampak terhadap kinerja program dalam penanganan rawan pangan di wilayah tersebut. Sehingga pemetaan wilayah dan rumah tangga rawan pangan akan sangat membantu pemerintah di tingkat daerah dalam merumuskan berbagai program aksi yang lebih tepat dan akurat.

Pemetaan dapat juga di jadikan petunjuk dalam mengembangkan strategi mitigasi yang tepat untuk menangani masalah rawan pangan yang ada dan untuk memberantas kelaparan pada suatu daerah. Berdasarkan Indeks Komposit Kerawanan Pangan / Index Food Insecurity (IFI), Badan Bimas Ketahanan Pangan Sumatera Barat tahun 2005, terlihat bahwa Kabupaten Kepulauan Mentawai termasuk yang mengalami daerah rawan pangan, sedangkan Kabupaten lainnya masih dapat mencukupi kebutuhan akan pangan dan tidak mengalami krisis pangan (lampiran 4). Indeks komposit kerawanan pangan / Index food Insecurity (IFI) merupakan suatu alat yang digunakan untuk menentukan kondisi suatu daerah, apakah rawan atau tahan pangan. Indeks komposit menjelaskan tentang kondisi kerawanan pangan suatu daerah yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi rawan pangan. Berdasarkan gambaran diatas maka timbul pertanyaan peneliti yaitu " Bagaimanakah sebaran kerawanan pangan di tingkat Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan apa penyebabnya " ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi sebaran keadaan pangan per Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai
2. Mengidentifikasi penyebab rawan pangan di Kecamatan paling rawan pangan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan melakukan identifikasi sebaran keadaan pangan per Kecamatan di Kabupaten Mentawai maka kita dapat mengetahui bagaimana kondisi atau keadaan dari masing-masing Kecamatan. Selanjutnya setelah mengetahui keadaan dari masing-masing Kecamatan maka dapat dirumuskan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan terhadap daerah yang paling rawan pangan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pangan

Pangan adalah komoditas yang biasa dimakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pangan merupakan komoditas agregat yang terdiri dari bermacam-macam komoditas pangan yang lebih spesifik seperti beras, jagung, ubi kayu, ikan, daging, telur, susu, buah-buahan, sayuran, makanan dan lain-lain.

Pangan dapat digolongkan ke dalam beberapa golongan sesuai dengan tujuan analisis. Pangan, misalnya dapat digolongkan berdasarkan kandungan gizinya, atau keutamaannya dalam memenuhi preferensi manusia. Menurut klasifikasi ini pangan dapat dikelompokkan ke dalam (i) makanan pokok dan (ii) bukan makanan pokok. Makanan pokok adalah makanan yang sudah biasa memenuhi menu dasar dalam setiap hidangan makan seperti halnya nasi bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Menurut konsep ilmu ekonomi, suatu jenis makanan dikatakan sebagai makanan pokok apabila persentase kenaikan konsumsi jenis makanan sebagai akibat kenaikan pendapatan adalah kurang dari persentase kenaikan pendapatan tersebut (Krisnamurthi, 2003).

Pangan merupakan kebutuhan manusia yang paling azasi, sehingga ketersediaan pangan bagi masyarakat harus selalu terjamin. Manusia dengan segala kemampuannya selalu berusaha mencukupi kebutuhannya dengan berbagai cara. Dalam perkembangan peradaban masyarakat untuk memenuhi kualitas hidup yang maju, mandiri, dalam suasana tentram, serta sejahtera lahir dan batin, semakin dituntut penyediaan pangan yang cukup, berkualitas dan merata. Oleh karena itu, kecukupan pangan bagi suatu bangsa merupakan hal yang strategis (Anonim (a), 2001)

Pengertian pangan sendiri juga memiliki dimensi yang luas. Mulai dari pangan yang esensial bagi kehidupan manusia yang sehat dan produktif (keseimbangan kalori, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, serat dan zat esensial lain), serta pangan

yang dikonsumsi atas kepentingan sosial dan budaya, seperti untuk kesenangan, kebugaran, kecantikan dan sebagainya.

Priyadi (2001) menyatakan bahwa penyediaan pangan dalam suatu daerah haruslah mendapat perhatian yang khusus, karena dengan adanya kecukupan pangan aktivitas keseharian dari penduduknya tidak mengalami gangguan sehingga potensi untuk tercipta kestabilan nasional dapat terwujud. Diwujudkannya kestabilan nasional merupakan syarat utama untuk melakukan pembangunan dalam segala bidang termasuk juga pembangunan dalam bidang pangan. Misalnya terciptanya komposisi pangan yang seimbang untuk dikonsumsi guna mememnuhi kebutuhan gizi penduduk yang disebut Pola Pangan Harapan(PPH). PPH dapat dinyatakan dalam bentuk komposisi energi (kalori), keanekaragaman pangan dan atau dalam bentuk komposisi berat (gram atau kg) keanekaragaman pangan yang memenuhi gizi penduduk.

Dengan demikian pangan sangat erat kaitannya dengan kestabilan nasional, yang mana keduanya bersifat timbal balik dalam artian pangan merupakan syarat penting terciptanya kestabilan nasional dan dari kestabilan nasional dapat dibangun bidang perpanganan yang dapat menyebabkan masyarakat sehat, cerdas, aktif dan berpikiran maju (Santoso, 2005)

Bahan pangan yang menjadi prioritas dalam program peningkatan ketahanan pangan adalah bahan pangan strategis, yang menghasilkan unsur-unsur gizi, makanan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia yaitu karbohidrat, protein, lemak, mineral dan vitamin. Bahan pangan strategis terdiri dari padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, kacang-kacangan, biji berminyak, sayur, buah dan gula (Anonim(c), 2004)

Pengadaaan pangan dapat dipenuhi melalui produksi domestik dan impor. Namun bagi Indonesia yang merupakan negara Kepulauan dengan penduduk yang besar maka sedapat mungkin pemenuhan kebutuhan pangan diupayakan berasal dari produksi dalam negeri. Ketergantungan pangan terhadap impor akan menciptakan kerentanan ketahanan pangan nasional berkaitan dengan resiko ketidakpastian penyediaan pangan dunia dan pasar. Pengamanan produksi agar tidak tergantung pada

impor perlu terus diupayakan melalui peningkatan produksi beras dan sumber pangan yang lain (Saragih, 2001).

Pengadaaan pangan sangat mempengaruhi penawaran bahan pangan. Penawaran (Supply) kebutuhan pangan ditentukan oleh jumlah produksi bahan pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Perkembangan jumlah produksi secara nasional dapat kita lihat pada tabel 1 berikut :

Tabel 1 : Perkembangan Produksi Pangan Secara Nasional 2000 - 2004

Komoditas	Produksi (000 ton)					Pertumbuhan (%)
	2000	2001	2002	2003	2004	
I. Pangan Nabati						
1. padi	51,899	50,461	51,490	52,138	54,31	1,68
2. Jagung	9,677	9,347	9,654	10,886	11,355	2,10
3. Kedelai	1,018	827	673	672	731	- 8,21
4. Kacang Tanah	737	710	718	786	834	3,51
5. Ubi kayu	16,089	17,055	16,913	18,524	19,507	4,69
6. Ubi Jalar	1,828	1,749	1,722	1,991	1,876	-0,10
7. Sayur	7,559	6,920	7,145	8,575	8,699	2,69
8. Buah-buahan	8,413	9,959	11,664	13,551	13,936	11,97
9. Minyak goreng (CPO)	7,581	9,097	10,020	10,683	12,366	14,21
10. Gula	1,691	1,725	1,755	1,632	2,020	5,64
II. Pangan Hewani						
1.Daging sapi-kerbau	386	382	373	410	426	1,51
2. Daging ayam	804	900	1,083	1,117	1,142	26,72
3. Telur	786	850	946	974	1,051	12,31
4. Susu	496	480	493	553	596	8,24
5. Ikan	5,107	5,353	5,516	5,816	6,213	5,03

Sumber : Laporan Kerja Badan Bimas Ketahanan Pangan Dept. Pertanian tahun 2004

Diversifikasi pangan dengan menambah berbagai jenis pangan selain beras dalam pola konsumsi rumah tangga mulai ditingkatkan. Hal tersebut diikuti pula dengan penyediaan dan kemudahan untuk mendapatkan komoditi non beras yang siap dikonsumsi di pasaran, demikian pula harganya yang dapat terjangkau dan dapat bersaing dengan harga beras. Faktor lain yang cukup menentukan kelangsungan pola konsumsi beraneka ragam komoditi adalah faktor kesinambungan penyediaannya. (Amang dan Husein, 1999)

B. Pentingnya Ketahanan Pangan

Pemantapan ketahanan pangan mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional karena : *Pertama*, akses terhadap pangan dengan gizi yang cukup merupakan hak yang paling azasi bagi manusia; *Kedua*, kualitas pangan dan gizi yang dikonsumsi merupakan unsur penentu yang paling penting bagi pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas; *Ketiga*, ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama yang menopang ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional yang berkelanjutan.

Ketahanan pangan sebagai suatu sistem terdiri dari tiga subsistem, yakni penyediaan, distribusi dan konsumsi. Ketiga subsistem ini merupakan satu kesatuan yang didukung oleh adanya input sumber daya alam (lahan, air, perairan), kelembagaan, budaya, permodalan, dan teknologi. Proses pemantapan ketahanan pangan ini digerakkan oleh kekuatan masyarakat dalam usaha agribisnis pangan yang ditopang oleh fasilitas dari pemerintah. Pembangunan ketiga subsistem tersebut diharapkan mampu mewujudkan kondisi terpenuhinya kebutuhan setiap penduduk atas pangan dengan gizi yang cukup untuk menjalani kehidupan yang sehat dan produktif dari hari ke hari. (Anonim (b), 2002).

Subsistem ketersediaan pangan, terkait dengan usaha produksi pangan termasuk penyelenggaraan cadangan ekspor dan impor. Ketersediaan pangan merupakan syarat keharusan untuk menciptakan ketahanan pangan. Namun demikian tanpa diikuti oleh sistem distribusi yang baik, maka ketersediaan pangan nasional yang cukup belum tentu dapat menjamin ketahanan pangan tiap rumah tangga, regional dan nasional. (Saragih, 2001)

Pemantapan ketahanan pangan mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional karena : *Pertama,* akses terhadap pangan dengan gizi yang cukup merupakan hak paling azasi bagi manusia ; *Kedua*, kualitas pangan dan gizi yang dikonsumsi merupakan unsur penentu yang penting bagi pembentukan sumberdaya berkualitas ; *Ketiga*, ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama yang menopang ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional yang berkelanjutan (Anonim (b), 2002).

Selain subsistem ketersediaan pangan, subsistem distribusi juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem ketahanan pangan. Subsistem distribusi pangan mencakup aspek aksesbilitas secara fisik dan ekonomi atas pangan secara merata. Distribusi bukan semata-mata mencakup aspek fisik dalam arti pangan yang tersedia di semua lokasi yang membutuhkan, tetapi juga menyangkut keterjangkauan ekonomi yang dicerminkan oleh harga dan daya beli masyarakat. Surplus pangan di tingkat wilayah belum tentu menjamin kecukupan pangan bagi individu masyarakat. Sistem distribusi ini perlu dikelola secara optimal dan tidak bertentangan dengan mekanisme pasar global, agar tercapai efisiensi dalam proses pemerataan akses pangan bagi seluruh penduduk (Suyana, 2003)

Subsistem distribusi menyangkut keterjangkauan ekonomi yang dicerminkan oleh harga dan daya beli masyarakat. Harga merupakan instrumen pokok pada kebijakan pangan. Seperti halnya BULOG (Badan Urusan Logistik) yang berperan penting dalam distribusi pangan khususnya beras melakukan distribusi untuk memeratakan penyediaan pangan di seluruh wilayah, sehingga akan lebih mudah bagi BULOG untuk menyalurkannya bila sewaktu-waktu terjadi gejolak harga di suatu tempat (Amang dan Husein, 1999).

Distribusi berhubungan erat dengan tingkat permintaan masyarakat (demand side) akan pangan. Keterjangkauan ekonomi sangat dipengaruhi oleh tingkat harga dan daya beli masyarakat. Tingkat harga dan daya beli masyarakat menentukan besarnya permintaan (demand) masyarakat akan bahan pangan.

Selain tingkat harga, daya beli masyarakat juga mempengaruhi tingkat permintaan (demand). Kemampuan daya beli masyarakat dapat ditunjukkan melalui tingkat upah. Tingkat upah merupakan salah satu indikator ketahanan pangan, karena besaran dan kecendrungan perubahan tingkat upah menunjukkan perubahan kemampuan daya beli rumah tangga (Anonim (a), 2004)

Perubahan indeks upah riil menggambarkan perubahan daya beli dari pendapatan yang diterima buruh. Semakin tinggi upah riil, maka semakin tinggi daya beli buruh dan sebaliknya. Adanya peningkatan upah riil buruh menggambarkan bahwa daya beli buruh meningkat. Kaitan upah buruh dengan ketahanan pangan

terletak pada kesinambungan nilai upah yang diterima buruh pada saat ini dalam mengakses pangan bagi rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan 2000 Kkal/kap/orang. Dimana perkiraan nilai nominal kebutuhan 2000 Kkal/kap/orang setara dengan Rp 5.573,- (Anonim(a), 2004)

Kebutuhan pangan nasional diperhitungkan berdasarkan kebutuhan untuk konsumsi langsung tingkat rumah tangga, permintaan antara oleh industri dan permintaan lainnya. Kebutuhan ini meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan pesat pada industri pengolahan pangan, pakan maupun industri lainnya (Soekirman dkk, 2004).

Subsistem yang terakhir adalah konsumsi pangan. Subsistem konsumsi merupakan subsistem yang menyangkut upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mempunyai pemahaman atas pangan, gizi dan kesehatan yang baik sehingga dapat mengelola konsumsinya secara optimal. Konsumsi pangan hendaknya memperhatikan zat pangan dan gizi yang cukup dan berimbang sesuai dengan kebutuhan bagi pembentukan manusia yang sehat, kuat, cerdas dan produktif. Dalam subsistem ini terdapat aspek penting lain yaitu aspek diversifikasi. Diversifikasi pangan merupakan suatu cara untuk memperoleh keragaman konsumsi zat gizi, sekaligus melepaskan ketergantungan masyarakat atas satu jenis pangan pokok tertentu yaitu beras. Ketergantungan yang tinggi tersebut dapat memicu instabilitas manakala pasokannya terganggu. Sebaliknya agar masyarakat menyukai pangan alternatif perlu ditingkatkan cita rasa, penampilan dan kepraktisan pengolahannya agar dapat bersaing dengan produk yang telah ada (Suyana, 2003)

Aspek aksesbilitas berkaitan dengan subsistem distribusi. Aspek aksesbilitas mencakup aspek fisik dan ekonomi atas pangan secara merata. Sistem distribusi bukan semata-semata mencakup aspek fisik dalam arti pangan yang tersedia di semua lokasi yang membutuhkan, tetapi juga menyangkut keterjangkauan ekonomi yang dicerminkan oleh harga dan daya beli masyarakat (Suyana, 2003).

Selain tersedia dan dapat dijangkau, bahan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat juga harus aman dan berkualitas. Artinya harus mengandung zat gizi yang

cukup. Status gizi merupakan suatu komponen kualitas hidup yang penting. Keuntungan ekonomi suatu bangsa dalam produk nasional bruto (GNP) hendaknya jangan digunakan sebagai satu-satunya ukuran pembangunan suatu negara, karena ia tidak menunjukkan kualitas hidup rakyat yang bertempat tinggal disitu. Oleh karena itu, perencanaan gizi harus merupakan bagian integral dari rencana nasional untuk pembangunan sosial dan ekonomi. (Suhardjo dkk, 1986)

Ketahanan pangan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari sisi permintaan (demand side) maupun dari sisi penawaran (supply side). Permintaan masyarakat akan bahan pangan dipengaruhi oleh bebarapa faktor utama yakni tingkat harga bahan pangan, pendapatan rata-rata masyarakat, dan cita rasa masyarakat (pola konsumsi terhadap bahan pangan). Sementara dari sisi penawaran, faktor utama yang mempengaruhi antara lain harga bahan pangan dan jumlah produksi. (Sukirno, 1982)

Dalam mempertahankan kondisi ketahanan pangan, terdapat beberapa masalah yang dihadapi, salah satunya adalah laju peningkatan kebutuhan pangan domestik lebih cepat dibandingkan dengan laju kemampuan produksinya. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk yang besar dan terus meningkat dan permintaan perkapita juga meningkat karena meningkatnya permintaan, kesadaran kesehatan, dan pergeseran pola makan sebagai pengaruh globalisasi. Di lain pihak hal tersebut juga disebabkan karena ketersediaan sumberdaya lahan telah semakin berkurang akibat tekanan penduduk, persaingan dengan sektor non pangan, eksploitasi lahan yang eksesif. Ketimpangan antara laju produksi dengan laju kebutuhan akan pangan dapat menyebabkan kesenjangan dalam mengakses bahan pangan serta turut mempengaruhi supply dan demand akan bahan pangan. (Sukirman dkk, 2004)

Peran fasilitas pemerintah diimplementasikan antara lain dalam membentuk kebijakan ekonomi makro dan perdagangan, pengaturan dan penyediaan sarana / prasarana publik serta intervensi dalam kegagalan pasar untuk mendorong agribisnis pangan yang berkeadilan. Peran pemerintah juga sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat agar mampu mengatasi masalah pangannya secara mandiri. Output dari pembangunan ketahanan pangan ini adalah terpenuhinya hak asasi manusia atas pangan, berkembangnya SDM yang berkualitas dan terciptanya

kondisi kondusif ketahanan pangan, ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional. Ketahanan pangan sebagai suatu sistem tersebut dapat digambarkan dalam kerangka yang ditampilkan melalui Gambar 1 (Anonim(b), 2004)

Gambar 1. Kerangka Sistem Ketahanan Pangan

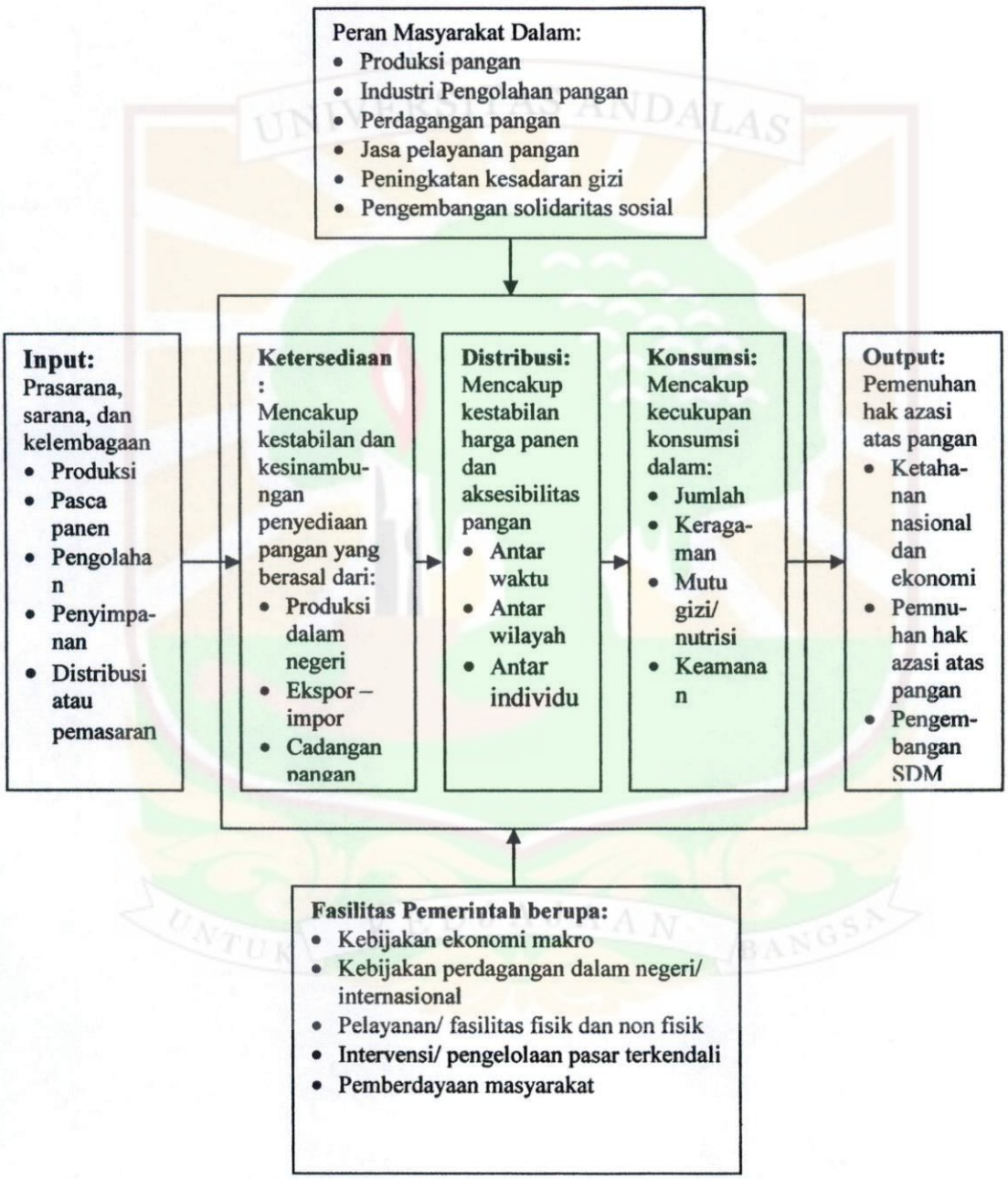

Sumber : Anonim (b) Tahun 2004

C. Kerawanan Pangan

Kerawanan pangan terjadi manakala rumah tangga, masyarakat atau daerah tertentu mengalami ketidakcukupan pangan untuk memenuhi standard kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan para individu anggotanya. Kerawanan pangan adalah situasi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standard kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat (Soekirman dkk, 2004).

Kerawanan pangan dapat diartikan sebagai kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat. Dari sini terdapat dua kondisi yang dapat dilihat, yaitu kondisi yang terjadi pada daerah/wilayah atau rumah tangga yang terganggu ketersediaan pangannya, dan kondisi lain pada masyarakat atau keluarga yang terganggu kemampuan akses terhadap pangan (Anonim, 2001)

Kerawanan pangan dapat dilihat dari sisi produksi, konsumsi dan distribusi. Dari aspek produksi rawan pangan adalah kemampuan menghasilkan tidak seimbang dengan pemenuhan kebutuhan. Disini hanya dilihat sisi kemampuan produksi bukan sisi ketersediaan, karena ketersediaan dapat dipenuhi dari adanya pasokan antar wilayah. Dari aspek konsumsi adalah ketidakmampuan membeli pangan karena tidak ada daya beli atau masyarakat miskin. Dari segi distribusi adalah ketidakseimbangan supply memenuhi demand sehingga terjadi kelangkaan pangan pada suatu tempat, waktu, jumlah dan harga yang memadai.

Kejadian kerawanan pangan dapat bersifat kronis (cronical) maupun sementara dan mendadak (transient). Kronis adalah keadaan kekurangan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia (sdm) sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin. Kejadian kerawanan pangan sementara akibat kejadian yang mendadak (transient) disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga seperti bencana alam, kerusuhan, musim yang menyimpang, konflik sosial dan sebagainya. Keadaan kerawanan pangan baik yang bersifat kronis maupun transien harus dapat dideteksi

sedini mungkin dan segara dapat diketahui penyebab terjadinya kerawanan pangan, sehingga dapat diambil langkah-langkah kegiatan pemberdayaan di daerah rawan pangan (Tempo, 2005)

Terjadinya kerawanan pangan baik kronis maupun transien harus secepatnya mendapat perhatian dan bantuan dari pemerintah. Jika tidak segera ditangani dengan baik dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap masyarakat yang mengalaminya. Misalnya terjadi penurunan tingkat kesehatan, kelaparan, gizi buruk sampai kematian (Suntoro, 2007)

Berdasarkan kondisi kerawanan pangan yang terjadi, maka penetapan kebijakan penanganan rawan pangan dapat dimulai dengan melakukan identifikasi dengan menggunakan instrumen yang ada atau yang disepakati secara terkoordinasi di daerah, terhadap kondisi yang melatar belakangi terjadinya rawan pangan. Kelembagaan di daerah untuk menangani kasus rawan pangan merupakan ujung tombak, karena sebenarnya daerah yang lebih dahulu tahu dan mengerti persis penyebab munculnya masalah rawan pangan serta tindakan pencegahan dan penanggulangan yang diperlukan. Setelah ditemukan penyebab kerawanan pangan, kemudian perlu melakukan tindakan intervensi yang ditujukan kepada kelompok/ rumah tangga tertentu untuk meningkatkan kemampuan akses terhadap pangan. Adapun langkah yang dapat diambil antara lain :1) melakukan kegiatan capacity building, 2) pemberian bantuan langsung pada kelompok masyarakat tani sesuai hasil identifikasi, dalam rangka memfasilitasi agar masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (*self help*) (Deptan, 2001).

Kebijakan pemantapan ketahanan pangan diarahkan untuk mengatasi tantangan dan masalah yang menghambat kinerja subsistem yang terdapat dalam ketahanan pangan, serta mendayagunakan peluang yang tersedia untuk memenuhi kecukupan pangan bagi setiap penduduk (Suyana, 2003). Kebijakan jangka pendek diarahkan untuk menangani kerawanan pangan tansien (mendadak), kebijakan jangka menengah diarahkan untuk mengatasi kerawanan pangan kronis secara lebih efektif serta meningkatkan kemampuan dan kemandirian dalam penyediaan, distribusi dan konsumsi pangan secara berkelanjutan. Kebijakan jangka panjang diarahkan untuk

meningkatkan kapasitas produksi nasional dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat dan mendorong diversifikasi pangan, serta meningkatkan jaminan bagi setiap penduduk untuk memperoleh pangan yang cukup (Suyana, 2003).

D. Analisis Ketahanan Pangan

Status ketahanan pangan dipengaruhi oleh tingkat agregasi dari satuan analisis yang digunakan. Keamanan pangan dapat menggunakan rumah tangga, wilayah atau negara sebagai satuan analisisnya. Tentu saja satuan analisis mana yang tepat tergantung pada tujuan analisis. Untuk kepentingan organisasi internasional seperti Bank Dunia misalnya negara merupakan satuan analisis yang tepat, Bangladesh, India dan Indonesia dipandang sebagai satuan contoh. Untuk kepentingan BAPPENAS wilayah seperti Propinsi dapat dipandang sebagai satuan contoh yang tepat untuk menganalisis kemanan pangan. Selanjutnya perlu juga dicatat bahwa dapat saja secara nasional situasi pangan ada pada derajat keamanan yang tinggi, tetapi belum tentu untuk regional dan rumah tangga (Pakpahan & Pasandaran 1990)

Ukuran aman pangan atau rawan pangan merupakan konsep yang mungkin memiliki makna berbeda bagi berbagai orang. Karena itu demi kelancaran komunikasi, ukuran keamanan pangan perlu dinyatakan dengan tegas. Yang dimaksud pengukuran adalah suatu upaya penggambaran atau penampilan suatu obyek, kejadian, sesuatu dengan menggunakan simbol-simbol, dimana simbol-simbol tersebut memiliki saling hubungan yang relevan satu dengan yang lainnya, sebagaimana obyek, kejadian atau sesuatu yang diwakilinya.

Ukuran tentang keamanan pangan secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam (i) ukuran subyektif, dan (ii) ukuran oyektif. Ukuran subyektif adalah ukuran keamanan pangan yang didasarkan atas opini, pandangan, sikap atau pendapat orang terhadap situasi pangan. Adapun ukuran obyektif dapat bervariasi seperti ukuran kemanan pangan didasarkan atas : (i) jumlah makanan secara umum, (ii) jumlah kalori yang dikonsumsi (iii) ketersediaan pangan per kapita, (iv) pangsa pengeluaran pangan terhadap total pengeluaran rumah tangga, (v) kemampuan rumah tangga atau

negara menghadapi guncangan atan shock dan seterusnya. Ukuran mana yang digunakan tergantung pada tujuan analisa data dan ketersediaan data.

Ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga maupun wilayah / daerah, ditentukan oleh berjalannya sistem ketahanan pangan pada rumah tangga atau wilayah yang bersangkutan. Apabila sistem ketahanan pangan yang meliputi subsitem ketersediaan, sub sitem distribusi dan sub sistem konsumsi secara sinkron berjalan bersama dan lancar maka ketersediaan pangan yang ada pada rumah tangga ataupun wilayah dan daerah tetap tercukupi..

Persediaan pangan yang cukup secara nasional ternyata tidak menjamin adanya ketahanan pangan pada tingkat regional maupun rumah tangga / individu. Sawit dan Ariani (2001) mengemukakan bahwa penentu ketahanan pangan di tingkat nasional, regional dan lokal dapat dilihat dari tingkat produksi, permintaan, persediaan dan perdagangan pangan. Sementara itu penentu di tingkat rumah tangga ialah akses (fisik dan ekonomi) terhadap pangan. Ketersediaan pangan dan resiko yang terkait dengan akses serta ketersediaan pangan tersebut. Indikator ketahanan pangan juga dapat dilihat dari pangsa pengeluaran rumah tangga. Semakin besar pangsa pengeluaran pangan suatu rumah tangga semakin rendah ketahanan pangannya (Pakpahan 1993).

Akses pangan dapat dimaknai menurut tataran wilayah dan tataran rumah tangga. Pada tataran wilayah diartikan sebagai kemampuan memperoleh dan mendistribusikan pangan mulai tingkat nasional, propinsi, kabupaten, kecamatan hingga tingkat desa. Pada tataran rumah tangga diartikan sebagai kemampuan keluarga untuk memperoleh pangan. Indikator akses pangan ditentukan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pangan.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Mentawai Propinsi Sumatera Barat. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan dengan sengaja (*purposive*) atas pertimbangan bahwa Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan daerah paling rawan pangan di Propinsi Sumatera Barat dalam Peta kerawanan Pangan/Food Insecurity Atlas (FIA) Propinsi Sumatera Barat tahun 2005 yang dikeluarkan oleh Badan Bimas Ketahanan Pangan. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan yakni pada bulan September – Oktober 2009

3.2 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Nazir (1999) metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti kasus sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran ataupun lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

3.3 Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari wawancara langsung dengan para keyinforman, sedangkan data sekunder diperoleh dari publikasi yang dilakukan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Propinsi.

3.4 Jenis dan Sumber data

Ada 2 jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni data primer dan data sekunder. Data primer didapat dengan melakukan wawancara langsung dengan para key informan. Sedangkan data sekunder didapat dari berbagai intansi seperti Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat, Badan Bimas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data tahun 2006, dimana hal ini disebabkan karena pada tahun pertengahan tahun 2007 Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami pemekaran dari 4 menjadi 10 Kecamatan. Dan data yang dibutuhkan untuk menjawab tujuan pertama dari penelitian ini tidak ada. Penggunaan data tahun 2006 sebagai tahun akhir digunakan untuk 8 indikator guna mengetahui Kecamatan rawan pangan di Kabupaten kepulauan Mentawai. Sedangkan untuk indikator ketersediaan bahan pangan di masing-masing Kecamatan digunakan data tahun 2004 sampai dengan tahun 2006.

3.4 Variabel yang Diamati

Ada 10 indikator untuk yang mengindikasikan suatu daerah atau wilayah termasuk dalam daerah rawan pangan. Kesepuluh indikator tersebut dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) dimensi ketahanan pangan yaitu dimensi ketersediaan pangan, dimensi akses terhadap pangan dan penghidupan serta dimensi kesehatan dan gizi. Kesepuluh indikator tersebut adalah :

a. Dimensi Ketersediaan Pangan

Indikator 1. Ratio Konsumsi Normatif

Ketersediaan pangan adalah satu hal yang penting, meskipun faktor ini saja tidak cukup untuk menggambarkan ketahanan pangan di suatu wilayah. Ketersediaan pangan tidak hanya diperoleh dari produksi pangan pokok di suatu wilayah saja, tetapi juga berasal dari kondisi netto ekspor dan impor yang diperoleh melalui berbagai jalur. Meskipun demikian, pada tingkat yang lebih rendah, sangat sukar sekali untuk mengetahui arus pemasukan dan pengeluaran pangan pokok tersebut. Oleh sebab itu, sebagai indikator ketersediaan pangan pada penelitian ini,

kita menggunakan ratio proporsi konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih pangan pokok (beras, jagung, umbi-umbian, sagu, pisang dan keladi) pada suatu daerah.

Digunakannya 6 macam bahan pangan pokok (beras, jagung,umbi-umbian, sagu, pisang dan keladi) dalam penelitian ini dikarenakan di Kabupaten Kepulauan Mentawai 6 bahan pangan tersebut menjadi bahan pangan pokok masyarakatnya. Beras , jagung dan umbi-umbian dikonsumsi oleh sebahagian warga masyarakat yang tinggal dekat dengan Ibukota Kecamatan, sedangkan sagu, pisang dan keladi menjadi bahan pangan pokok warga yang tinggal jauh dari Ibukota Kecamatan (pedalaman). Sehingga dalam penelitian ini yang menjadi total produksi bersih dari bahan pangan pokok di kecamatan ini adalah jumlah produksi bersih dari beras, jagung, umbi-umbian, sagu, pisang dan keladi.

Standar kebutuhan kalori per hari per kapita adalah 2.000 Kkal (standar Pola Pangan Harapan sesuai dengan hasil Widya Karya Pangan dan Gizi VIII Tahun 2004), dan untuk mencapai 50% kebutuhan kalori tersebut harus dikonsumsi kurang lebih 300 gram pangan pokok per hari. Oleh sebab itu dalam analisis ini kita memakai 300 gram sebagai nilai konsumsi normatif (konsumsi yang direkomendasikan).

Untuk menghitung ketersediaan pangan pokok per kapita per hari suatu daerah, digunakan rumus :

$$F = \frac{\text{Produksi bersih pangan pokok (gram)}}{\text{Jumlah Penduduk x 365 (hari)}}$$

Sedangkan untuk menghitung rasio konsumsi normatif per kapita per hari terhadap ketersediaan pangan pokok digunakan rumus :

$$R = \frac{\text{Konsumsi Normatif per kapita per hari}}{\text{Ketersediaan pangan pokok per kapita per hari}} = \frac{300 gram}{F}$$

Dimana:

1. R > 1 = daerah tersebut defisit (kebutuhan konsumsi normatif masyarakat tidak terpenuhi dari produksi bersih sereal yang tersedia di daerah tersebut).
2. R < 1 = daerah tersebut surplus (kebutuhan konsumsi normatif masyarakat dapat terpenuhi dari produksi bersih sereal yang tersedia di daerah tersebut).

Untuk mengetahui tingkat ketersediaan bersih dari ke enam bahan pangan tersebut maka terlebih dahulu harus dihitung produksi bersih dari ke enam bahan bangan pokok tersebut. Produksi bersih didapat setelah jumlah produksi dikurangi dengan penyusutan dari bahan pangan tersebut. Kemudian untuk mendapatkan ketersediaan bersih dari bahan pokok tersebut dilakukan konversi dari produksi bersih bahan pangan tersebut. Adapun angka penyusutan dan konversi dari ke enam bahan pangan tersebut dapat dilihat pada tabel 2 berikut :

Tabel 2 : Penyusutan dan Konversi Bahan Pangan Pokok di Kab. Mentawai

No	Bahan Pangan Pokok	Penyusutan	Konversi
1.	Beras	0,0464	63,2 %
2.	Jagung	0,0376	60 %
3.	Umbi-Umbian	0,0376	28 %
4.	Sagu	0,089	40 %
5.	Pisang	0,062	17,5 %
6.	Keladi	0,078	26,3 %

Sumber : Badan Bimas Ketahanan Pangan dan Dinas Kesehatan Propinsi Sumbat

b. Dimensi Akses Terhadap Pangan & Penghidupan

Dimensi kedua dari kerawanan pangan adalah akses terhadap pangan & penghidupan. Indikator-indikator yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah :

Indikator 2. Persentase Penduduk Miskin (%)

Indikator ini menunjukkan ketidak mampuan untuk mendapatkan cukup pangan, karena rendahnya kemampuan daya beli. Atau hal ini mencerminkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti, makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan lain-lain. Persentase penduduk miskin pada

masing-masing Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai didapat dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Total jumlah Penduduk}} \text{ x } 100\ \%$$

Indikator 3. Persentase Penduduk Tanpa Akses Terhadap Listrik

Tersedianya fasilitas listrik di suatu wilayah akan membuka peluang yang lebih besar untuk akses pekerjaan. Ini juga merupakan indikasi kesejahteraan suatu wilayah atau rumah tangga. Persentase penduduk tanpa akses listrik untuk masing – masing Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai didapat dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga teraliri listrik (PLN)}}{\text{Banyak rumah tangga}} \text{ x } 100\ \%$$

Indikator 4. Persentase Desa Tanpa Akses Jalan Yang Memadai (%)

Jalan merupakan infrastruktur wilayah yang sangat mempengaruhi kinerja kegiatan ekonomi. Dalam perdagangan/pemasaran produk pertanian ada fungsi pertukaran dan fungsi fisik. Proses pengangkutan dan handling product diperlancar infrastruktur jalan yang baik. Desa tanpa akses jalan yang memadai ini adalah desa yang untuk bisa sampai ke daerah tersebut hanya dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 ataupun lewat transportasi laut. Adapun persentase dari Desa tanpa akses jalan yang memadai untuk masing-masing kecamatan di kabupaten Kepulauan Mentawai didapat dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah desa tanpa akses jalan memadai}}{\text{Banyaknya Desa}} \text{ x } 100\ \%$$

c. Dimensi Kesehatan dan Gizi

Kategori ini meliputi infrastruktur kesehatan dan akibat yang ditimbulkan (outcome) dilihat dari aspek nutrisi dan kesehatan. Selain kedua indikator ini, data perempuan buta huruf dimasukkan di sini, yang secara global diakui sebagai indikator yang menjelaskan proporsi yang signifikan dari tingkat malnutrisi pada anak. Indikator-indikator tersebut :

Indikator 5. Persentase Rumah Tangga Berjarak > 5 km dari Puskesmas (%)

Manfaat fasilitas kesehatan sangat penting untuk menurunkan angka kesakitan (morbiditas) penduduk dan dengan demikian akan meningkatkan kemampuan seseorang dalam menyerap makanan ke dalam tubuh dan memanfaatkannya. Akses yang lebih dekat ke fasilitas kesehatan (seperti Puskesmas) merupakan indikator yang sangat penting untuk menunjukkan bagaimana rumah tangga mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan / Puskesmas. Untuk mendapatkan persentase rumah tangga yang berjarak > 5 km dari Puskesmas untuk masing-masing Kecamatan dilakukan dengan rumus :

$$\frac{\text{Banyak Rumah tangga} > 5\,\text{km}}{\text{Banyak Rumah Tangga}} \times 100\,\%$$

Indikator 6. Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses ke Air Bersih(%)

Akses terhadap air bersih memegang peranan yang sangat penting untuk pencapaian ketahanan pangan. Air yang tidak bersih akan meningkatkan angka kesakitan dan menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan dan pada akhirnya akan mempengaruhi status nutrisi seseorang. Penggunaan air bersih disini adalah bahwa rumah tangga tersebut menggnakan air minum yang berasal dari air mineral, air ledeng/PAM, pompa air, air sumur atau sumber mata air terlindung. Sedangkan untuk menghitung persentase dari Rumah tangga tanpa akses air bersih di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah dengan rumus :

$$\frac{\text{Rumah tangga tanpa akses air bersih}}{\text{Banyaknya rumah tangga}} \times 100\,\%$$

Indikator 7. Umur Harapan Hidup

Keuntungan memakai angka harapan hidup sebagai indikator untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat adalah : pengukuran angka kematian pada semua kelompok umur tidak memerlukan standar populasi. Karena itu hasil yang diperoleh tidak tergantung pada standar populasi yang digunakan. Ini juga memungkinkan untuk membandingkan angka kematian antar wilayah. Sebagai tambahan,

pengukuran angka kematian ini juga lebih mudah dipahami oleh populasi secara umum.

Indikator 8. Persentase Berat Badan Balita di Bawah Standard (%)

Status gizi anak (biasanya usia di bawah 5 tahun) merupakan salah satu indikator yang sangat baik digunakan pada kelompok kesehatan dan gizi. Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi seorang anak biasanya adalah situasi ketahanan pangan rumah tangga, status gizi dan kesehatan ibu, pendidikan ibu, pola asuh anak, akses terhadap air bersih, akses terhadap pelayanan kesehatan yang tepat waktu. Untuk mendapatkan persentase berat badan Balita di bawah standard untuk masing-masing Kecamatan adalah dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah balita yang berat badannya di bawah standard}}{\text{Banyaknya Balita yang ditimbang}} \times 100\ \%$$

Indikato 9. Persentase kematian bayi (%)

Tingkat kematian bayi menjadi indikator yang sangat baik untuk mengukur kinerja kualitas pelayanan dan penanganan kesehatan kelompok usia yang masih rentan terserang penyakit yaitu bayi. IMR sangat terkait dengan pola asuh, pengetahuan tentang gizi di masyarakat dan juga kebiasaan di masyarakat dalam menjaga kesehatan. Indikator ini merupakan indikator output dalam aspek ketahanan pangan. Untuk mendapatakan persentase angka kematian bayi untuk masing-masing Kecamatan diitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah kematian bayi}}{\text{jumlah kelahiran}} \times 100\ \%$$

Indikator 10. Persentase Perempuan Yang Buta Huruf (%)

Pendidikan ibu akan memberikan dampak secara langsung terhadap kesehatan dan status gizi anak. Pada wilayah yang persentase perempuan buta huruf tinggi, maka ditemukan insiden yang tinggi pula untuk kasus anak kurang gizi. Seorang ibu yang memiliki pendidikan yang memadai akan mempengaruhi pola asuh anak di rumah dan dengan demikian akan membantu dalam meningkatkan status gizi

anak. Untuk mendapatkan persentase perempuan buta huruf masing-masing Kecamatan dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{.Jumlah perempuan buta huruf}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100\ \%$$

3.5 Analisa Data

Untuk mencapai tujuan pertama yaitu mengidentifikasi sebaran daerah rawan pangan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, maka digunakan data deskriptif kuantitatif. Untuk mengidentifikasi daerah yang mengalami rawan pangan di Kabupaten Kepulauan Mentawai maka digunakan alat analisa indeks komposit kerawanan pangan yaitu alat analisa yang digunakan oleh Badan Bimas Ketahanan Pangan, untuk membuat pemetaan daerah rawan pangan. Yang dilihat dari segi ketersediaan, akses terhadap pangan dan dimensi Kesehatan dan gizi diukur dengan menggunakan metode rangking sederhana. Indeks komposit dihitung tanpa pembobotan indikator, kemudian urutan rata-rata komposit dihitung dengan menggunakan indikator terpilih. Semakin tinggi nilai Indeks kompositnya, semakin tinggi tingkat kerawanan pangan.

Dimana :

- 0,00 - < 0,16 → Sangat Tahan Pangan
- 0,16 - < 0,32 → Tahan Pangan
- 0,32 - < 0,48 → Cukup Tahan Pangan
- 0,48 - < 0,64 → Cukup Rawan Pangan
- 0,64 - < 0,80 → Rawan Pangan
- > = 0,80 → Sangat Rawan Pangan

a. **Penghitungan Indeks Komposit Kerawanan Pangan**

Indeks komposit kerawanan pangan/index food insecurity (I_{FI}) dihitung dengan menggunakan 10 (sepuluh) indikator kerawanan pangan kronis melalui cara sebagai berikut :

$$I_{FI} = 1/10\ (I_{AV} + I_{BPL} + I_{ELEC} + I_{ROAD} + I_{PUSK} + I_{WATER} + I_{LEX} + I_{NUT} + I_{IMR} + I_{ILLIT})$$

Dimana :

I_{FI} : Indeks komposit kerawanan pangan (index food insecurity).

I_{AV} : Indeks ketersediaan pangan (index availability)

I_{BPL} : Indeks Penduduk Miskin (index below poverty line)

I_{ELEC} : Indeks penduduk tanpa akses terhadap listrik (index electricity)

I_{ROAD} : Indeks desa tanpa akses jalan yang memadai (index road)

I_{PUSK} : Indeks rumah tangga berjarak > 5 km dari puskesmas

I_{WATER} : Indeks rumah tangga tanpa akses ke air bersih (index water)

I_{LEX} : Indeks umur harapan hidup (index life expectancy)

I_{NUT} : Indeks berat badan balita dibawah standard (index nutrition)

I_{IMR} : Indeks angka kematian bayi (index infant mortality rate)

I_{ILLIT} : Indeks perempuan buta huruf (index female illiteracy)

b. Indeks Indikator Individu

Untuk mencari indeks indikator individu digunakan dengan cara merubah nilai masing-masing indikator ke dalam skala 1 ke 0, yaitu :

$$\text{Indeks } X_{i\text{-}j} = \frac{X_{i\text{-}j} - X_{imin}}{X_{imax} - X_{imin}}$$

Di mana,,

X_{ij} = nilai ke – j dari indikator ke – I

j = Daerah yang diamati I = Indikator

'min' dan 'max' = nilai minimum dan maksimum dari indikator tersebut

1. Indeks Ketersediaan Pangan/Index availability (I_{AV})

Untuk mendapatkan angka dari indeks ketersediaan pangan pada masing – masing Kecamatan maka dilakukan penghitungan dengan rumus :

$$I_{AV} = \frac{\text{Ratio konsumsi Kecamatan - Ratio konsumsi minimal}}{\text{Ratio konsumsi maksimal - Ratio konsumsi minimal}}$$

2. Indeks Penduduk miskin / indeks below poverty line (I_{BPL})

   Untuk mendapatkan angka dari indeks penduduk miskin masing-masing Kecamatan dilakukan penghitungan dengan rumus :

$$I_{BPL} = \frac{\text{Persentase penduduk miskin Kecamatan} - \text{Persentase penduduk miskin minimal}}{\text{Persentase penduduk miskin maksimal} - \text{persentase penduduk miskin minimal}}$$

3. Indeks penduduk tanpa akses listrik / index electricity (I_{ELEC})

   Untuk mendapatkan angka indeks penduduk tanpa akses listrik di masing-masing kecamatan dilakukan penghitungan dengan rumus :

$$I_{ELEC} = \frac{\text{Persentase penduduk tanpa akses listrik Kecamatan} - \text{Persentase penduduk tanpa akses listrik minimal}}{\text{Persentase penduduk tanpa akses listrik maksimal} - \text{Persentase penduduk tanpa akses listrik minimal}}$$

4. Indeks penduduk tanpa akses jalan yang memadai / index road (I_{ROAD})

   Untuk mendapatkan angka indeks penduduk tanpa akses jalan yang memadai di masing-masing kecamatan dilakukan penghitungan dengan rumus :

$$I_{ROAD} = \frac{\text{Persentase penduduk tanpa akses jalan yang memadai Kecamatan} - \text{Persentase penduduk tanpa akses jalan minimal}}{\text{Persentase penduduk tanpa akses jalan yang memadai maksimal} - \text{Persentase penduduk tanpa akses jalan minimal}}$$

5. Indeks rumah tangga berjarak > 5 km dari puskesmas (I_{PUSK})

   Untuk mendapatkan angka indeks penduduk yang berjarak > 5 Km dari Puskesmas di masing-masing kecamatan dilakukan penghitungan dengan rumus :

$$I_{PUSK} = \frac{\text{Persentase RT berjarak} > 5 \text{ Km Kecamatan} - \text{Persentase RT berjarak} > 5 \text{ Km minimal}}{\text{Persentase RT berjarak} > 5 \text{ Km maksimal} - \text{Persentase RT berjarak} > 5 \text{ Km minimal}}$$

6. Indeks rumah tangga tanpa akses ke air bersih / index water (I_{WATER})

   Untuk mendapatkan angka indeks penduduk tanpa akses ke air bersih di masing-masing kecamatan dilakukan penghitungan dengan rumus :

$$I_{WATER} = \frac{\text{Persentase RT tanpa akses air bersih Kecamatan} - \text{Persentase RT tanpa akses air bersih minimal}}{\text{Persentase RT tanpa akses air bersih maksimal} - \text{Persentase RT tanpa akses air bersih minimal}}$$

7. Indeks umur harapan hidup / Index life expectancy (I_{LEX})

   Untuk mendapatkan angka indeks umur harapan hidup di masing-masing kecamatan dilakukan penghitungan dengan rumus :

$$I_{LEX} = \frac{\text{Umur harapan hidup Kecamatan} - \text{Umur harapan hidup minimal}}{\text{Umur harapan hidup maksimal} - \text{umur harapan hidup minimal}}$$

8. Indeks berat badan balita di bawah standar / Index nutrition (I_{NUT})

   Untuk mendapatkan angka indeks berat badan balita yang di bawah standard pada masing-masing kecamatan dilakukan penghitungan dengan rumus :

$$I_{NUT} = \frac{\text{Persentase berat badan balita di bawah standar Kecamatan} - \text{Persentase berat badan balita di bawah standar minimal}}{\text{Persentase berat badan balita di bawah standar maksimal} - \text{Persentase berat badan balita di bawah standar minimal}}$$

9. Indeks angka kematian bayi / Index infant mortality rate (I_{IMR})

   Untuk mendapatkan angka indeks kemtian bayi pada masing-masing kecamatan dilakukan penghitungan dengan rumus :

$$I_{IMR} = \frac{\text{Persentase angka kematian bayi Kecamatan} - \text{Persentase angka kematian bayi minimal}}{\text{Persentase angka kematian bayi maksimal} - \text{Persentase angka kematian bayi minimal}}$$

10. Indeks perempuan buta huruf / Index female illiteracy (I_{ILLIT})

    Untuk mendapatkan angka indeks kemtian bayi pada masing-masing kecamatan dilakukan penghitungan dengan rumus :

$$I_{ILLIT} = \frac{\text{Persentase perempuan buta huruf Kecamatan} - \text{Persentase perempuan buta huruf minimal}}{\text{Persentase perempuan buta huruf maksimal} - \text{Persentase perempuan buta huruf minimal}}$$

c. Identifikasi Penyebab Rawan Pangan

Untuk mencapai tujuan kedua dari penelitian ini maka dilakukan analisa secara deskriptif dimana faktor-faktor penyebab kerawanan pangan itu akan diidentifikasi dengan kegiatan wawancara langsung dengan beberapa key informan. Wawancara dengan para key informan dilakukan secara terbuka dengan mendalami penyebab mengapa daerah tersebut menjadi rawan pangan dengan berpedoman pada indikator-indikator yang ada. Adapun para key informan itu adalah :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Mentawai, Cq Kepala Kesbanglinmas Kabupaten Kepulauan Mentawai
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai
3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Mentawai
4. Camat Kecamatan Paling rawan Pangan di Kabupaten Kepulauan Mentawai
5. Pimpinan Puskesmas di kecamatan paling rawan pangan Kabupaten Kepulauan Mentawai

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Sumatera Barat dengan posisi geografis yang terletak diantara 0°55'00" - 3°21'00" Lintang Selatan dan 98°35'00" - 100°32'00" Bujur Timur dengan luas wilayah sebesar 6.011,35 Km^2 dan garis pantai sepanjang 758 km. Secara geografis, daratan Kabupaten Kepulauan Mentawai ini terpisahkan dari Propinsi Sumatera Barat oleh laut serta berbatasan :

- Sebelah Utara dengan Selat Siberut
- Sebelah Timur dengan Selat Mentawai
- Sebelah Selatan dengan Selat Sanding
- Sebelah Barat dengan Samudera Hindia

Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri atas 4 pulau besar ditanbah pulau-pulau kecil. Keempat pulau ini adalah Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan. Kabupaten kepulauan Mentawai terdiri dari 4 Kecamatan, 43 desa dan 202 dusun. Keempat Kecamatan tersebut adalah kecamatan Pagai Utara Selatan dengan Ibukota Kecamatan adalah Sikakap, Kecamatan Sipora dengan ibukota Kecamatan adalah Sioban, Kecamatan Siberut Utara selatan dengan ibukota Kecamatan adalah Muara Siberut dan Kecamatan Siberut Utara dengan Ibukota Kecamatan adalah Muara sikabaluan.

Kondisi geografis dan alam Kabupaten Kepulauan Mentawai saat ini sebagian besar merupakan kawasan hutan. Total kawasan hutan (terdiri dari hutan lebat, hutan sejenis, semak belukar) memiliki persentase terbesar yaitu mencapai 86,14 % dari luas wilayah Kabupaten kepulauan Mentawai atau sebesar 517.803 hektar dan sebagian berpotensi sebagai lahan tidur, meliputi 449.333 hektar berupa hutan lebat (74,75%), 34.215 hektar berupa hutan sejenis (5,69%) dan selebihnya sebesar 34.255 hektar berupa semak belukar (5,70%). Sementara itu komposisi luas lahan yang dimanfaatkan untuk budidaya sektor pertanian adalah 78.589 hektar atau 13,07% dari

total luas wilayah, meliputi 1.420 hektar luas lahan untuk sawah (0,24%), 40 hektar luas lahan untuk tegalan (0,01%), 56.557 hektar luas lahan untuk kebun campuran (9,41%) dan 20.572 hektar luas lahan untuk perkebunan (3,42%)

Luas lahan yang terbesar adalah di Kecamatan Pagai utara Selatan yaitu 754,10 hektar atau 53,11% dari total luas sawah di Kabupaten Kepulauan Mentawai, sedangkan luas lahan sawah di kecamatan Sipora dan Siberut Selatan masing – masing sebesar 517,54 hektar (36,45%) dan 90,80 hektar (6,96%). Luas lahan terkecil ada di kecamatan Siberut Utara yaitu 49,56 hektar atau 3,49 % dari total luas lahan sawah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Luas lahan untuk pemukiman atau rumah hanya sebesar 3.479 hektar atau 0,58 % dari total luas wilayah. Keadaan lahan untuk pemukiman di Kabupaten Kepulauan Mentawai ini tersebar untuk masing-masing Kecamatan. Terkadang untuk mencapai daerah Pemukiman disuatu dusun atau desa pada Kecamatan yang sama memerlukan waktu yang lama. Hampir sebagian besar transportasi utama masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah dengan menggunakan jalur laut.

Secara topografi, keadaan geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai bervariasi antara dataran, sungai, dan berbukit-bukit. Dimana rata-rata ketinggian daerah seluruh ibukota Kecamatan di atas Permukaan Laut (DPL) adalah 2 meter. Kabupaten Kepulauan Mentawai beribukota di Tua Pejat yang terletak di Kecamatan Sipora dengan jarak tempuh ke kota Padang sepanjang 153 km. Untuk mencapai Ibukota Propinsi Sumatera Barat ini harus ditempuh melalui jalur laut. Begitu pula halnya transportasi dari masing-masing ibukota kecamatan ke Kota Padang ataupun ke Ibukota Kabupaten juga harus ditempuh melalui jalur laut.

Jumlah penduduk Kabupaten Mentawai pada tahun 2006 berdasarkan data Bidang Bina Program Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat tahun 2007 adalah 70.436 orang dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 36.513 orang dan penduduk perempuan berjumlah 33.923 orang. Jumlah penduduk terbesar adalah di Kecamatan Pagai Utara Selatan dengan jumlah penduduk sebanyak 23.241 orang atau mencapai 32,84 % dari total jumlah penduduk, kemudian diikuti oleh Kecamatan Siberut Selatan dengan 17.084 orang atau mencapai 26,75 % dari total jumlah

penduduk. Selanjutnya Kecamatan Siberut Utara 15.291 orang atau mencapai 21,20 % dari total jumlah penduduk, dan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Sipora 14.810 orang atau mencapai 19,21 % dari total jumlah penduduk.

Kepadatan penduduk untuk masing-masing Kecamatan menunjukkan hasil yang cukup bervariasi dimana justru kepadatan penduduk tertinggi ada di kecamatan Sipora dengan nilai sebesar 21,58 (22 orang/ Km^2), sedangkan Kecamatan Pagai Utara Selatan yang mempunyai jumlah penduduk terbesar mempunyai kepadatan penduduk dengan nilai 14,32 (!4 orang /Km^2). Adapun kepadatan penduduk di Kecamatan Siberut Selatan dan Siberut Utara masing - masing bernilai 9,47 (9 orang / Km^2) dan 6,48 (6 orang/ Km^2). Total kepadatan penduduk di Kabupaten kepulauan Mentawai itu sendiri hanya mencapai 11,01 (11 orang / Km^2).

4.2. Identifikasi Sebaran Keadaan per Kecamatan di Kabupaten Kep. Mentawai

4.2.1. Analisa Indikator Kerawanan Pangan

a. Indikator 1 : Ratio Konsumsi Normatif

Ketersediaan Pangan merupakan fungsi dari produksi dan perdagangan pangan. Dan pada gilirannya produksi pangan tergantung pada berbagai faktor, seperti iklim, sifat tanah, curah hujan, irigasi, komponen produksi pertanian yang digunakan, dan bahkan insentif bagi para petani untuk menghasilkan tanaman pangan. Produksi tanaman pangan dalam satu tahun juga dapat dipengaruhi oleh serangan bencana alam. Tanaman pangan terdiri atas tanaman biji-bijian, kacang-kacangan, tanaman penghasil minyak nabati, sayur-sayuran, rempah, gula, dan produk hewani. Karena di Kabupaten Kepulauan Mentawai ada 6 jenis bahan pangan yang menjadi bahan pangan pokok masyarakatnya maka analisis yang digunakan analah produksi pangan beras, jagung, pisang, umbi-umbian, sagu, pisang dan keladi

Analisa yang dilakukan pada awalnya dilakukan secara makro. Kemampuan produksi suatu daerah dapat bervariasi dari tahun ke tahun yang dipengaruhi berbagai faktor. Karena itu digunakan data rata-rata produksi dalam 3 tahun untuk menganalisanya.

Untuk melihat perkembangan produksi pangan pokok selama tiga tahun tersebut dapat dilihat pada Tabel 3 dan tabel 4 berikut

Tabel 3. Produksi Padi, Jagung dan Umbi-umbian Di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2004, 2005 dan 2006

No	Kecamatan	Produksi Padi (ton)				Produksi Jagung (Ton)				Produksi Umbi-umbian			
		2004	2005	2006	Rata 2	2004	2005	2006	Rata2	2004	2005	2006	Rata2
1	Pagai Utara Selatan	537,60	166,60	1459,2	721,13	40	9,6	6,3	18,63	119,6	104,4	118,4	114,13
2	Sipora	1176	522	742,2	813,4	20.8	21	6,6	16,13	221,4	202,4	116	179,93
3	Siberut Selatan	193,5	224,4	352,4	256,77	323,4	17,4	4	114,93	195,6	149,4	67,6	137,53
4	Siberut Utara	271,4	198	360,6	276,67	102	5,4	2	36,47	136,2	57	48	80,4

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kepulauan Mentawai

Tabel 4. Produksi Sagu, Pisang, Keladi Di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2004, 2005 dan 2006

No	Kecamatan	Produksi sagu (ton)				Produksi pisang (Ton)				Produksi keladi (ton)			
		2004	2005	2006	Rata 2	2004	2005	2006	Rata2	2004	2005	2006	Rata2
1	Pagai Utara Selatan	23,00	23,00	11,00	19,00	120,88	162,00	114,64	132,51	8,80	8,60	8,30	8,57
2	Sipora	38,40	38,40	6,50	27,77	102,96	153,00	111,52	122,49	9,80	8,86	9,56	9,41
3	Siberut Selatan	28,40	28,40	57,60	38,13	110,04	134,44	111,20	118,56	9,60	8,46	8,60	8,88
4	Siberut Utara	19,20	19,20	40,08	26,16	126,12	126,48	105,75	119,45	10,70	8,20	7,90	8,93

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kepulauan Mentawai

Dari tabel 3 dan tabel 4 dapat kita lihat bahwa produksi tertinggi dalam hal makanan pokok adalah produksi beras, dan produksi terendah adalah produksi keladi. Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa produksi padi yang dihasilkan oleh Kecamatan Pagai Utara Selatan mengalami penurunan tajam pada tahun 2005 menjadi 16,60 ton dan meningkat tajam pula pada tahun 2006 menjadi 1.459,2 ton. Untuk produksi jagung terlihat bahwa produksi jagung mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2006 apabila dibandingkan dengan tahun 2004, dimana produksi jagung untuk masing-masing Kecamatan tidak ada yang mencapai angka 10 ton. Penurunan tertinggi terjadi pada Kecamatan Siberut Selatan dimana pada tahun 2004 produksi jagungnya mencapai 323,4 ton dan hanya menjadi 4 ton saja pada tahun 2006. Kalau dilihat dari rat-rata produksi bahan pangan tahun 2004-2006 maka kita dapati Kecamatan Pagai Utara Selatan menjadi penghasil tertinggi padi yakni dengan 721,13 ton. Untuk produksi jagung rata-rata produksi tertinggi terdapat pada Kecamatan Siberut Selatan dengan 114,93 ton dan produksi umbi-umbian tertinggi terdapat pada Kecamatan Sipora dengan 179,93 ton.

Sedangkan dari tabel 4 dapat kita lihat bahwa dalam hal rata-rata produksi sagu tertinggi terdapat pada kecamatan Siberut Selatan dengan 38,1 ton dan yang paling rendah dihasilkan oleh kecamatan Pagai Utara selatan dengan 19,0 ton. Selanjutnya produksi pisang tertinggi terdapat pada Kecamatan Pagai Utara Selatan dengan 132,51 ton dan yang terendah dihasilkan oleh Kecamatan Siberut Selatan dengan 118,5 ton. Untuk produksi rata-rata tertinggi bahan pangan keladi dihasilkan oleh Kecamatan Sipora yakni 9,47 ton, dan yang paling rendah dihasilkan oleh Kecamatan Pagai Utara selatan dengan 8, 57 ton

Untuk melihat tingkat ketersediaan pangan pokok masyarakat perlu dicari ketersediaan bersih dari ke enam bahan pangan tersebut. Adapun ketersediaan bersih dari ke enam bahan pangan pokok masyarakat pada 4 (empat) Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, serta rata-ratanya dapat dilihat pada tabel 5 dan 6.

Tabel 5 : Ketersediaan Bersih Beras, Jagung dan Umbi-umbian Tahun 2004 - 2006

No	Kecamatan	Produksi Bersih Beras (Ton)				Produksi Bersih Jagung (Ton)				Produksi Bersih Umbi-Umbian (Ton)			
		2004	2005	2006	Rata2	2004	2005	2006	Rata2	2004	2005	2006	Rata2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pagai Utara Selatan	323,996	100,405	879,415	434,605	23,099	5,543	3,637	10,759	54,352	45,031	66,128	55,170
2	Sipora	708,739	314,593	447,227	490,186	12,011	12,127	3,814	9,317	98,097	89,295	67,175	84,248
3	Siberut Selatan	116,616	135,239	212,380	154,745	186,754	10,048	2,31	66,371	106,08	82,085	40,579	76,248
4	Siberut Utara	163,564	119,329	217,323	166,739	58,902	3,119	1,155	21,059	62,777	26,404	29,475	59,328

Tabel 6 : Ketersediaan Bersih Sagu, Pisang dan keladi Tahun 2004 – 2006

No	Kecamatan	Produksi Bersih Sagu (Ton)				Produksi Bersih Pisang (Ton)				Produksi Bersih Keladi (Ton)			
		2004	2005	2006	Rata2	2004	2005	2006	Rata2	2004	2005	2006	Rata2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pagai Utara Selatan	8,381	8,381	4,008	6,923	19,892	26,592	18,818	21,751	2,134	2,085	2,013	2,077
2	Sipora	13,993	13,993	2,368	10,118	16,90	18,306	25,115	20,107	1,969	2,148	1,876	1,998
3	Siberut Selatan	11,549	11,549	20,989	14,696	18,063	22,068	18,20	19,444	2,328	2,085	2,051	2,155
4	Siberut Utara	6,996	6,996	22,576	12,189	20,073	20,762	17,359	19,611	2,35	1,988	1,916	2,085

Pada tabel 5 dapat kita lihat bahwa terjadi peningkatan produksi bersih beras untuk Seluruh Kecamatan pada tahun 2006 bila dibandingkan dengan tahun 2005, dimana produksi bersih beras tertinggi terdapat pada Kecamatan Pagai Utara selatan dengan 879,415 ton, dilanjutkan dengan Kecamatan Sipora dengan 447,227 ton, Kecamatan Siberut Utara 217,323 ton dan yang terendah adalah Kecamatan Sibeut Selatan dengan 217,323 ton.

Untuk produksi bersih jagung untuk seluruh Kecamatan mengalami penurunan yang sangat tajam sehingga tidak ada Kecamatan yang dapat mencapai produksi bersih jagung sebesar 5 ton, dimana masing-masing Kecamatan produksi bersih jagung adalah 3,637 ton untuk Kecamatan Pagai Utara Selatan, 3,814 ton untuk Kecamatan Sipora, 2,31 ton Untuk Kecamatan Siberut selatan dan 1,155 ton untuk Kecamatan Siberut Utara.

Dari tabel 5 dapat kita lihat bahwa produksi bersih umbi-umbian rata-rata pada masing-masing Kecamatan secara berurutan adalah : Kecamatan Sipora 84,248 ton, Kecamatan Siberut Selatan 76,248 ton, Kecamatan Siberut Utara 59,328 ton dan Kecamatan Pagai Utara Selatan 55,170 ton. Pada tabel 6 dapat dilihat terjadi penurunan produksi bersih sagu pada Kecamatan Pagai Utara Selatan dan Sipora pada tahun 2006, dimana penurunan terbesar terjadi pada Kecamatan Sipora. Untuk Kecamatan Siberut Utara dan Siberut Selatan mengalami peningkatan produksi bersih sagu pada tahun 2006 dan peningkatan yang paling tinggi berada pada Kecamatan Siberut Utara. Namun untuk rata-rata produksi bersih sagu tertinggi terdapat pada Kecamatan Siberut Selatan dengan angka 14,696 ton, disusul kemudian Kecamatan Siberut Utara 12.189 ton, Kecamatan Sipora 10,118 ton dan yang terendah adalah Kecamatan Pagai Utara Selatan dengan angka 6,923 ton.

Untuk produksi bersih pisang Kecamatan yang selalu meningkat produksi bersih pisangnya setiap tahunnya adalah Kecamatan Sipora dimana pada tahun 2004 produksi bersihnya 16,90 ton, kemudian pada tahun 2006 menjadi 18,306 ton dan meningkat kembali pada tahun 2006 menjadi 25,115 ton. Namun untuk rata-rata produksi bersih pisang tertinggi terdapat pada Kecamatan Pagai Utara selatan dengan angka 21,751 ton, kemudian diikuti oleh Kecamatan Sipora dengan angka 20,107 ton, kemudian disusul oleh Kecamatan Siberut Utara dengan angka 19,611 ton, sedangkan rata-rata produksi bersih sagu terendah terdapat pada Kecamatan Siberut Selatan dengan angka 19,444 ton.

Dari tabel 6 dapat kita lihat juga bahwa rata-rata produksi bersih keladi tertinggi terdapat pada Kecamatan Siberut selatan dengan 2,155 ton, disusul oleh Kecamatan Siberut Utara dengan 2,085 ton, Kecamatan Pagai Utara Selatan 2,077 ton dan yang

paling rendah adalah Kecamatan Sipora dengan 1,998 ton. Penghitungan untuk mendapatkan angka ketersediaan bersih beras, jagung, umbi-umbian, sagu, pisang dan keladi (sebagai bahan pangan pokok masyarakat) dapat dilihat pada lampiran 6. Namun peneliti merasa perlu untuk menyampaikan bahwa angka sekunder dari produksi sagu, pisang dan keladi belumlah bisa dikatakan menggambarkan bahwa angka-angka tersebut merupakan produksi keseluruhan dari ketiga bahan pangan tersebut. Hal ini dikarenakan di lapangan peneliti melihat bahwa untuk ketiga jenis bahan pangan ini bagi masyarakat yang menjadikan sagu, pisang dan keladi sebagai bahan pangan pokok tidaklah pernah merasa kekurangan ataupun kesulitan untuk mendapatkan bahan pangan tersebut, dikarenakan di ladang-ladang mereka, tanaman pangan ini mereka tanam untuk dikonsumsi langsung oleh mereka.

Ketersediaan pangan tidak hanya diperoleh dari produksi biji-bijian di suatu wilayah saja, tetapi juga berasal dari kondisi netto ekspor dan impor yang diperoleh dari berbagai jalur. Meskipun demikian pada tingkat mikro misalnya tingkat Kabupaten dan tingkat yang lebih rendah sangat sukar sekali untuk mengetahui arus pemasukan dan pengeluaran pangan biji-bijian tersebut. Oleh sebab itu sebagai indikator ketersediaan pangan pada penelitian ini digunakan proporsi konsumsi normatif terhadaap ketersediaan bersih pangan pokok yang layak dikonsumsi manusia.

Rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih pangan pokok per kapita per hari merupakan petunjuk tentang kecukupan pangan pada suatu wilayah. Konsumsi normatif didefinisikan sebagai jumlah pangan pokok yang harus dikonsumsi oleh seseorang per hari untuk memperoleh kilo kalori energi dari sereal dan umbi-umbian sebagai sumber karbohidrat. Pola konsumsi di Indonesia menunjukkan bahwa rata-rata seseorang memperoleh 50% keperluan energi hariannya dari sereal dan umbi-umbian. Standar kebutuhan kalori per hari per kapita adalah 2.100 Kkal, dan untuk mencapai 50% kebutuhan kalori, maka seseorang harus mengkonsumi kurang lebih 300 gram pangan pokok per hari. Oleh sebab itu dalam analisis ini kita memakai 300 gram sebagai nilai konsumsi normatif (konsumsi yang direkomendasikan).

Perlu dijelaskan bahwa dalam analisis ini dipilih penggunaan konsumsi normatif dari pada penggunaan konsumsi aktual (konsumsi sehari-hari), karena konsumsi aktual dipengaruhi oleh banyak hal di luar faktor ketersediaan pangan itu sendiri (misalnya : daya beli rumah tangga, fasilitas pasar dan infrastuktur, kemampuan penyerapan sereal, kebiasaan, dan lain-lain).

Untuk menghitung ketersediaan pangan pokok per kapita per hari suatu daerah, digunakan rumus :

$$F = \frac{\text{Produksi bersih pangan pokok (gram)}}{\text{Jumlah Penduduk x 365 (hari)}}$$

Sedangkan untuk menghitung rasio konsumsi normatif per kapita per hari terhadap ketersediaan pangan pokok digunakan rumus :

$$R = \frac{\text{Konsumsi Normatif per kapita per hari}}{\text{Ketersediaan pangan pokok per kapita per hari}} = \frac{300 gram}{F}$$

Jika R lebih dari 1, maka daerah tersebut defisit (kebutuhan konsumsi normatif masyarakat tidak terpenuhi dari produksi bersih sereal dan umbi-umbian yang tersedia di daerah tersebut).

Jika R kurang dari 1, maka daerah tersebut surplus (kebutuhan konsumsi normatif masyarakat dapat terpenuhi dari produksi bersih sereal dan umbi-umbian yang tersedia di daerah tersebut).

Sedangkan untuk menentukan tingkat kerawanan pangan suatu daerah, data rasio di atas dirubah / dikonversi ke dalam suatu indeks, yang menggunakan skala 0 sampai 1 (pada tabel dicantumkan I_{AV}). Hasil pengolahan data untuk 4 (empat) Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai (untuk menghitung rasio dan indeks tersebut di atas) dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7 : Ratio Konsumsi Normatif Terhadap Ketersediaan Pangan Pokok serta Indeksnya

No	Kecamatan	Jumlah Produksi Bersih Pangan Pokok (Ton)	Jumlah Penduduk	Ketersediaan Pangan Pokok/ Kapita/hari (gram)	Rasio Konsumsi Normatif/ Kap/Hari Terhadap Ketersediaan Pangan Pokok	IAV
1	Pagai Utara Selatan	531,295	23.241	62,631	4.789	**0,65**
2	Sipora	619,974	14.820	114,613	2,617	**0,000**
3	Siberut Selatan	336,659	17.084	53,989	5,557	**0,879**
4	Siberut Utara	281,011	15.291	50,349	5,958	**1,000**

Dari tabel 7 terlihat bahwa seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak dapat mencukupi kebutuhan pangan pokok masyarakatnya yang berasal dari pangan pokok (beras, jagung dan umbi-umbian). Hal ini terlihat dari tingkat ketersediaan pangan pokok per kapita per harinya yang tidak sampai mencapai 300 gram, sedangkan angka konsumsi normatif adalah 300 gram. Hal ini juga terlihat dari angka rasio konsumsi normatif per kapita per harinya terhadap ketersediaan pangan pokok yakni berada di atas angka 1 yang berarti seluruh Kecamatan tersebut mengalami defisit. Dan defisit tertinggi terjadi pada kecamatan Siberut Utara dengan angka ratio konsumsi normatifnya adalah 5,958, kemudian diikuti oleh Kecamatan Siberut Selatan dengan 5,557, Kecamatan Pagai Utara Selatan dengan 4,789 dan defisit paling rendah dialami oleh kecamatan Sipora dengan 2,617. Maka bisa kita katakan bahwa tidak ada satupun Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang bisa memenuhi aspek ketersediaan pangannya sendiri

b. Indikator 2 : Persentase Penduduk Miskin (%)

Untuk melihat persentase penduduk miskin dan melihat indeks dari penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8 : Penduduk Miskin (%) Tahun 2006

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase Penduduk miskin	Indeks Penduduk Miskin (I_{BPL})
1.	Pagai Utara Selatan	3.283	23.241	14,12	**0,000**
2.	Sipora	2.653	14.280	17,90	**0,695**
3.	Siberut Selatan	2.957	17.084	17,31	**0,586**
4.	Siberut Utara	2.991	15.291	19,56	**1,000**

Pada tabel 8 dapat kita lihat bahwa penduduk miskin terbanyak terdapat di kecamatan Siberut Utara dengan 19,56 % disusul Kecamatan Sipora dengan 17,90 %, Kecamatan Siberut Selatan dengan 17,31 % dan Kecamatan Pagai Utara selatan dengan 14,12 %. Dan untuk Indeks penduduk miskinnya (I_{BPL}) tertingginya adalah pada Kecamatan Siberut Utara

c. Indikator 3 : Persentase Penduduk tanpa akses listrik (%)

Untuk melihat persentase penduduk tanpa akses listrik dan melihat indeks dari penduduk tanpa akses listrik dapat dilihat pada tabel 9. Adapun persentase tersebut dihitung berdasarkan jumlah rumah tangga yang belum terlaliri listrik oleh PLN tahun 2006

Tabel 9 : Penduduk tanpa akses listrik (%) tahun 2006

No	Kecamatan	Banyak rumah tangga	Rumah tangga belum teraliri PLN	Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	Indeks rumah tangga tanpa akses listrik (I_{ELEC})
1.	Pagai Utara Selatan	5.632	4.570	81,1	**0,483**
2.	Sipora	4.048	2.878	71,1	**0,000**
3.	Siberut Selatan	3.552	2.903	81,7	**0,512**
4.	Siberut Utara	2.960	2.716	91,8	**1,000**

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Kecamatan Siberut Utara merupakan Kecamatan dengan persentase penduduk tanpa akses listrik terbesar. Adapun jumlah dari rumah tangga yang belum teraliri listrik PLN di Kecamatan tersebut adalah 2.716 rumah tangga. Selanjutnya berurutan dari yang terbesar adalah Kecamatan Siberut Selatan dengan 2.903 rumah tangga, Kecamatan Pagai Utara Selatan 4.570 rumah tangga dan yang terendah adalah Kecamatan Sipora dengan 2.903 rumah tangga. Untuk lebih lengkapnya data mengenai rumah tangga yang belum teraliri listrik PLN di Kabupaten Kepualuan Mentawai dapat dilihat pada lampiran 8.

d. Indikator 4 : Persentase Desa tanpa akses jalan yang memadai (%)

Untuk melihat desa tanpa akses jalan yang memadai ini dan melihat indeks dari desa tanpa akses jalan yang memadai di 4 (empat) Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10: Desa tanpa akses jalan yang memadai (%) tahun 2006

No.	Kecamatan	Banyak Desa	Banyak Desa tanpa akses jalan memadai	Persentase Desa tanpa akses jalan memadai	Indeks Desa tanpa akses jalan memadai (I_{ROAD})
1	Pagai Utara Selatan	10	1	10	**0,000**
2	Sipora	13	5	38.462	**0,948**
3	Siberut Selatan	10	3	30	**0,666**
4	Siberut Utara	10	4	40	**1,000**

Persentase desa tanpa akses jalan yang memadai di Kabupaten Kepulauan Mentawai ini diambil berdasarkan jumlah desa yang memang tidak memiliki akses jalan yang memadai di Kecamatan tersebut. Tidak memiliki akses jalan yang memadai yang dimaksud adalah tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda empat. Jadi untuk sampai ke desa tersebut hanya bisa ditempuh dengan kendaraan roda dua atau jalan memutar melalui laut seperti desa Simatalu yang terletak di Pantai Barat Kecamatan Siberut Utara.

e. Indikator 5 : Persentase Rumah Tangga Berjarak > 5 km dari Puskesmas (%)

Data tidak tersedia.

f. Indikator 6 : Persentase Rumah tangga tanpa akses ke air bersih (%)

Akses air bersih adalah kebutuhan utama bagi masyarakat agar dapat hidup sehat untuk kegiatan sehari-hari. Kesulitan dalam mengakses air bersih akan mengakibatkan berbagai penyakit yang akhirnya menyebabkan kematian. Kemampuan untuk menyerap pangan akan tergantung pada sistem Imunisasi pada tubuh manusia. Imunisasi pada anak-anak membantu pengembangan ketahanan tubuh dalam mengantisipasi timbulnya penyakit dan kematian.

Tabel 11 : Persentase Rumah tangga tanpa akses ke air bersih tahun 2006.

No.	Kecamatan	Banyak rumah Tangga	Rumah tangga tanpa akses air bersih	Persentase Rumah Tangga tanpa akses air bersih (%)	Indeks Rumah tangga tanpa akses air bersih (I_{WATER})
1	Pagai Utara Selatan	5.632	420	7,469	**0,000**
2	Sipora	4.048	369	9,115	**0,827**
3	Siberut Selatan	3.552	336	9,459	**1,000**
4	Siberut Utara	2.960	242	8,716	**0,355**

Dari Tabel 11 dapat dilihat bahwa rumah tangga tanpa akses air bersih terbesar di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2006 terdapat pada Kecamatan Siberut selatan yakni 9,459 %, disusul selanjutnya Kecamatan Sipora 9,115 %, Kecamatan Siberut Utara 8,716 % dan Kecamatan Pagai Utara Selatan yakni 7,469 %. Rumah tangga tanpa akses air bersih disini maksudnya rumah tangga yang menjadikan sumber air yang digunakannya berasal dari sumber air yang tidak terlindungi.

g. Indikator 7 : Umur Harapan Hidup

Kita mengetahui bahwa gizi dan kesehatan berkorelasi positif dalam lamanya kehidupan manusia. Semakin rendah Umur harapan hidup penduduk, akan

mencerminkan semakin tinggi tingkat kerawanan pangan suatu daerah, dan demikian juga sebaliknya.

Tabel 12 : Angka Harapan Hidup Tahun 2006

No.	Kecamatan	Angka harapan hidup (tahun)	Indeks angka harapan hidup (I_{LEX})
1	Pagai Utara Selatan	68,4	**0,000**
2	Sipora	68,1	**0,538**
3	Siberut Selatan	67,8	**0,769**
4	Siberut Utara	67,1	**1,000**

Sumber : Analisa Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Barat 2006

Dari tabel 12 dapat kita lihat bahwa Kecamatan Pagai Utara Selatan merupakan Kecamatan dengan angka harapan hidup paling tinggi yakni 68, 4 tahun . Kemudian disusul oleh Kecamatan Sipora 68,1 tahun , Kecamatan Siberut Selatan 67,8 tahun dan yang terendah adalah Kecamatan Siberut Utara yakni 67,1 tahun

h. Indikator 8 : Persentase Berat Badan balita di bawah standar (%)

Status gizi anak (biasanya usia di bawah 5 tahun) merupakan salah satu indikator yang sangat baik digunakan pada kelompok kesehatan dan gizi. Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi seorang anak adalah situasi ketahanan pangan rumah tangga, status gizi dan kesehatan ibu, pendidikan ibu, pola asuh anak, akses terhadap air bersih, serta akses terhadap pelayanan kesehatan yang tepat waktu.

Tabel 13 : Persentase Berat Badan Balita dibawah standar (%) tahun 2006

No.	Kecamatan	Jumlah Balita yang ditimbang	Berat Badan Balita di bawah Standar (jiwa)	Persentase Berat badan balita di bawah standar (%)	Indeks berat badan balita di bawah standar (I_{NUT})
1	Pagai Utara Selatan	909	21	2,36	**0,000**
2	Sipora	827	61	7,37	**1,000**
3	Siberut Selatan	671	18	2,68	**0,073**
4	Siberut Utara	528	36	6,82	**0,89**

Pada tabel 13 bahwa pada Kecamatan Sipora merupakan angka tertinggi dari persentase berat badan balita yang dibawah standar. Selanjutnya persentase berat badan balita di bawah standar adalah pada Kecamatan Siberut Utara yakni 7,37 %, diikuti kemudian Kecamatan Siberut Utara 6,82 %, Kecamatan Siberut Selatan 2,68 % dan yang paling rendah Kecamatan Pagai Utara selatan dengan 2,36 %

Persentase ini dihitung berdasarkan jumlah Balita yang ditimbang pada Pada Kecamatan tersebut dan dilihat mana yang berat badannya naik dan mana yang berat badannya berada di bawah garis merah (BGM). Balita yang berat badannya berada pada BGM inilah yang diambil sebagai Balita dengan berat badan di bawah standar. Untuk jumlah Balita yang ditimbang dan mengalami kenaikan berat badan serta yang berda di BGM dapat dilihat pada lampiran 11

i. Indikator 9 : Persentase Angka Kematian Bayi (Per Kelahiran Hidup/Tahun)

Angka kematian bayi didefinisikan sebagai jumlah kematian bayi (kematian pada tahun pertama kehidupan) terhadap jumlah bayi yang lahir pada kelahiran tahun yang sama. Kematian bayi disebabkan oleh pola asuh anak yang tidak layak, malnutrisi, tidak memadainya fasilitas kesehatan dan angka morbiditas yang tinggi.

Tabel 14 : Angka Kematian Bayi tahun 2006

No.	Kecamatan	Jumlah Kelahiran	Jumlah kematian bayi (jiwa)	Angka Kematian Bayi (%)	Indeks angka kematian bayi (I_{IMR})
1	Pagai Utara Selatan	608	17	2,79	**0,33**
2	Sipora	299	8	2,68	**0,318**
3	Siberut Selatan	310	4	1,29	**0,000**
4	Siberut Utara	207	12	5,8	**1,000**

Angka kematian bayi yang terlihat pada tabel 14 di atas merupakan jumlah dari bayi yang lahir mati dan jumlah bayi mati. Jumlah lahir mati disini maksudnya adalah bayi yang waktu dilahirkan oleh ibunya langsung meninggal saat itu, sedangkan yang bayi mati tersebut merupakan bayi yang meninggal sebelum umurnya 1 tahun (kurang dari 1 tahun). Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kematian bayi tertinggi terdapat di Kecamatan Pagai Utara Selatan dengan 17 orang yang meninggal. Namun

angka itu tidak otomatis menjadikan Kecamatan Pagai Utara Selatan memiliki persentase tertinggi dalam hal angka kematian Bayi. Untuk persentase angka kematian bayi tertinggi didapati pada Kecamatan Siberut Utara dengan angka 5,8 %, baru diikuti oleh Kecamatan Pagai Utara Selatan dengan 2,79 %, Kecamatan Sipora 2,68 % dan yang paling rendah adalah kecamatan Siberut Selatan dengan 1,29 %.

j. Indikator 10 : Persentase Perempuan Buta Huruf (%)

Pemenuhan asupan gizi untuk anak Balita sangat tergantung dari komposisi makanan yang diberikan oleh si ibu pada anaknya. Sering terjadi kekurangan gizi pada anak Balita disebabkan oleh pengetahuan si Ibu yang kurang atau tidak tahu tentang gizi berimbang walaupun mereka termasuk keluarga yang mapan. Gizi kurang akan sering terjadi pada daerah-daerah yang ibunya buta huruf.

Tabel 15 : Perempuan buta huruf (%) Tahun 2006

No.	Kecamatan	Jumlah penduduk perempuan	Jumlah perempuan buta huruf	Persentase Perempuan buta huruf	Indeks perempuan buta huruf (I_{ILLIT})
1	Pagai Utara Selatan	11.630	548	4,71	**0,000**
2	Sipora	6.378	333	5,22	**0,125**
3	Siberut Selatan	7.647	491	6,41	**0,415**
4	Siberut Utara	7.728	495	8,04	**1,000**

Dari tabel 15 di atas dapat dilihat bahwa perempuan buta huruf tertinggi berada pada Kecamatan Siberut Utara dengan angka 8,04 %. Diikuti Kecamatan Siberut Selatan dengan 6,41 %, Kecamatan Sipora 5,22 %, dan yang paling rendah adalah Kecamatan Pagai Utara Selatan dengan angka 4,71 %.

4.2.2. Identifikasi Kecamatan Rawan Pangan

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, untuk mengetahui kondisi rawan pangan di suatu wilayah (Kecamatan), maka harus dihitung indeks komposit dari 10 indikator yakni dari sisi ketersediaan pangan, akses pangan dan kehidupan serta indikator kesehatan gizi. Indeks komposit kerawanan pangan didapat dengan

menghitung indeks rawan pangan komposit, yakni dengan menggabungkan indikator-indikator yang bobotnya ditetapkan dengan analisa utama.

Dengan mengetahui indeks komposit kerawanan pangan kita dapat melihat dan mengidentifikasi penyebab utama kondisi kerawanan pangan di suatu wilayah (Kecamatan). Perlu diketahui juga bahwa penyebab kerawanan pangan antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya bervariasi dan dengan demikian cara penyelesaiannya juga berbeda., dimana daerah yang memiliki tingkat rawan pangan yang lebih tinggi memerlukan perhatian segera. Hasil dari analisa dan penghitungan indikator-indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 16 dan 17.

Tabel 16 : Data Indikator Kerawanan Pangan Tahun 2006

No	Kecamatan	Ratio konsumsi Normatif	Persentase Pddk. Miskin (%)	Pensentase Pddk. Tanpa Akses Listrik (%)	Persentase Desa Tanpa Akses Jalan (%)	Persentase RT > 5 Km Dari Puskesmas (%)	Persentase RT Tanpa Akses ke Air Bersih (%)	Umur Harapan Hidup (Tahun)	Persentase Berat Badan Balita di Bawah Standar (%)	Persentase Angka Kematian Bayi (%)	Persentase Perem-puan Buta Huruf (%)
1	Pagai Utara Selatan	4,789	14,12	81,1	10	-	7,469	68,4	2,31	2,79	4,71
2	Sipora	2,617	17,90	71,1	38,462	-	9,115	68,1	7,37	2,68	5,22
3	Siberut Selatan	5,557	17,31	81,7	30	-	9,459	67,8	2,68	1,29	6,41
4	Siberut Utara	5,958	19,56	91,8	40	-	8,176	67,1	6,82	5,8	8,04

Tebel 17 . Indeks Komposit Kerawanan Pangan Tahun 2006

No	Kecamatan	IAV	IBPL	IELEC	IROAD	IPUSK	IWATER	ILEX	INUT	IIMR	ILLIT	IFI	Keterangan
1	Pagai Utara Selatan	0,65	0,000	0,483	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,33	0,000	0,163	**Tahan Pangan**
2	Sipora	0,000	0,695	0,000	0,948	-	0,827	0,538	1,000	0,318	0,125	0,495	**Cukup Rawan Pangan**
3	Siberut Selatan	0,819	0,586	0,512	0,666	-	1,000	0,759	0,073	0,000	0,415	0,543	**Cukup rawan pangan**
4	Siberut Utara	1,000	1,000	1,000	1,000	-	0,355	1,000	0,89	1,000	1,000	0,916	**Sangat rawan pangan**

I_{AV} : Indeks ketersediaan pangan (index availability)
I_{BPL} : Indeks Penduduk Miskin (index below poverty line)
I_{ELEC} : Indeks penduduk tanpa akses terhadap listrik (index electricity)
I_{ROAD} : Indeks desa tanpa akses jalan yang memadai (index road)
I_{PUSK} : Indeks rumah tangga berjarak > 5 km dari puskesmas
I_{WATER} : Indeks rumah tangga tanpa akses ke air bersih (index water)
I_{LEX} : Indeks umur harapan hidup (index life expectancy)
I_{NUT} : Indeks berat badan balita dibawah standard (index nutrition)
I_{IMR} : Indeks angka kematian bayi (index infant mortality rate)
I_{ILLIT} : Indeks perempuan buta huruf (index female illiteracy)
I_{FI} : Indeks komposit kerawanan pangan (index food insecurity).

$$I_{FI} = 1/9\ (I_{AV} + I_{BPL} + I_{ELEC} + I_{ROAD} + I_{PUSK} + I_{WATER} + I_{LEX} + I_{NUT} + I_{IMR} + I_{ILLIT})$$

Berdasarkan penghitungan indeks komposit yang dapat dilihat pada tabel 17 Kecamatan Siberut Utara menempati peringkat pertama sebagai kecamatan paling rawan pangan di Kabupaten Kepulauan Mentawai karena memiliki derajat kerawanan paling tinggi di antara Kecamatan lainnya. Berdasarkan indikator tunggal "bobot" terbesar yang menyebabkan Kecamatan Siberut Utara berada pada posisi tersebut hampir dari seluruh indikator yang digunakan Kecamatan Siberut Utara menjadi Kecamatan yang paling mendominasi indeks terendah. Adapun indikator tersebut adalah adalah indikator Ketersediaan pangan penduduk miskin, penduduk tanpa akses listrik, penduduk tanpa akses jalan yang memadai, umur harapan hidup, berat badan balita di bawah standar dan indikator perempuan buta huruf. Adapun status 3 kecamatan lainnya adalah Kecamatan Pagai Utara Selatan merupakan kecamatan dalam kondisi tahan pangan, Kecamatan Sipora dan Kecamatan Siberut Selatan dalam keadaan cukup rawan pangan.

4.3 Faktor Penyebab Kecamatan Rawan Pangan.

Untuk menjawab tujuan kedua dari penelitian ini tentang faktor – faktor penyebab terjadinya kerawanan pangan di Kecamatan paling rawan pangan yakni Kecamatan Siberut Utara maka dilakukanlah wawancara terbuka dengan para key informan. Sehingga dari hasil wawancara tersebut didapatlah faktor-faktor kenapa Kecamatan Siberut Utara bisa menjadi Kecamatan paling rawan pangan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan Kecamatan Siberut Utara menjadi kecamatan rawan pangan di Kabupaten Kepulauan Mentawai menurut key informan adalah :

4.3.1. Faktor Geografis

Faktor geografis merupakan faktor awal yang menjadikan Kecamatan Siberut Utara ini manjadi Kecamatan yang paling rawan pangan. Menurut Kepala Dinas Pertanian yang dalam hal ini diwakili oleh Kabid Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Bapak Umaruddin, SP, bahwa Kecamatan Siberut Utara ini tidak dapat memenuhi aspek ketersediaan pangannya adalah karena keadaan alamnya yang menjadikan masyarakat disana malas untuk bersawah. Mereka menjadi malas karena tidak adanya kepastian dalam memasarkan hasil pertanian bila mereka mengalami panen nantinya. Karena jarak yang jauh itu dan sifat tanaman pangan yang yang cepat rusak mereka takut bila saat mereka

panen cuaca sedang tidak baik, maka mereka tidak bisa keluar, karena transportasi dari dan menuju ke sana adalah melalui laut.

Selanjutnya hal ini didukung pula oleh Kepala Dinas Kesehatan Bapak S.Tarigan yang mengatakan bahwa yang menyebabkan tingginya angka kematian bayi dan masih tingginya jumlah bayi dengan berat badan di bawah standar adalah karena akses kesehatan tidak bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Paling yang dapat dengan cepat dapat mengakses sarana kesehatan adalah masyarakat yang tinggal di sekitar Ibukota Kecamatan saja, sedangkan angka-angka tadi menjadi tinggi karena dibawa dari masyarakat yang tinggal di pedalaman. Karena faktor geografis jugalah maka banyak ibu-ibu hamil yang sulit dipantau karena kunjungan yang tidak lengkap yang nantinya juga ketika mereka melahirkan mereka akan meminta pertolongan bukan kepada tenaga kesehatan, melainkan kepada dukun.

Faktor geografis ini memanglah sangat mempengaruhi kemajuan di daerah tersebut, karena akses jalan yang layak di Kecamatan itu tidaklah seberapa. Seperti yang diungkapkan Bapak Jusmil A. key informan dari Badan Kesbanglinmas Kabupaten Kepulauan Mentawai. Untuk membuat jalan yang baik yang bisa dilewati kendaraan saja sangatlah mahal, karena semua bahan yang akan digunakan untuk membuat jalan disana haruslah didatangkan dari Padang, dan pemerintah tidak memiliki dana yang cukup untuk hal tersebut. Belum lagi jika dilihat masih tingginya masyarakat tanpa akses listrik di derah tersebut, dimana akses listrik itu didapat hanya oleh warga di sekitar Kecamatan dan itu hanya melalui pembangkit dengan sumber diesel.

Selanjutnya penyebab dari rawan pangan di Kecamatan ini adalah dikarenakan penggunaan lahan yang tidak optimal, hal ini juga dipengaruhi oleh faktor geografis tadi, dimana 68,73 % dari luas wilayah Kecamatan tersebut adalah hutan. Kemudian dalam hal memiliki akses kesehatan di Kecamatan ini, dari 10 desa yang ada Puskesmas hanya ada 1 buah dan itu terletak di Ibukota kecamatan, sedangkan Pustu (puskesmas pembantu yang dimiliki hanya 7 buah (tidak dimiliki di setiap desa). Ketidakadaan pustu itu dikarenakan jauhnya jarak ke desa tersebut apalgi untuk desa Simatalu, yang mana untuk bisa sampai ke sana hanya bisa dilalui dengan jalan laut dan itupun harus memutar melalui pantai Barat.

4.3.2. Faktor Sumberdaya manusia yang Umumnya berkualitas rendah

Salah satu indikator yang menjadikan terpilihnya Kecamatan Siberut Utara ini menjadi Kecamatan rawan pangan adalah rendahnya angka harapan hidup di Kecamatan ini bila dibandingkan dengan Kecamatan lainnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai, dimana menurut Kepala Puskesmas Kecamatan Siberut Utara Bapak Marinus SKM, disebabkan karena asupan gizi yang dikonsumsi oleh masyarakatnya belumlah memenuhi aspek gizi ideal yang dianjurkan oleh Dinas Kesehatan, dan hal itu disebabkan karena pengetahuan masyarakatnya yang rendah. Pengetahuan yang rendah ini juga didukung dengan tingginya jumlah perempuan buta huruf di Kecamatan ini. Karena Pengetahuan yang rendah jugalah makanya jumlah bayi yang berat badannya di bawah garis merah cukup tinggi di Kecamatan ini. Dimana hal itu merupakan karena ketidaktahuan si Ibu tentang gizi yang baik dan yang dibutuhkan oleh bayi mereka, kemudian adanya pola asuh yang salah dalam hal memilih menu makanan untuk bayi mereka.

Faktor SDM rendah ini juga danggap sebagai salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan di daerah tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jusmil A (Kesbanglinmas) faktor pengetahuan inilah yang menjadikan pendapatan dan penghasilan masyarakat disana rendah. Pengetahuan yang rendah yang menjadikan mereka sudah cukup puas dengan apa yang sudah mereka dapati sekarang, sehingga menjadikan belum terbitnya rasa untuk hidup lebih maju dalam diri mereka.

Masih rendahnya faktor SDM bisa kita lihat dengan masih tradisionalnya pola pertanian yang dilakukan oleh masyarakat setempat, dimana pertanian yang dilakukan masih berpindah-pindah, belum lagi adopsi teknologi yang digunakan belumlah maju. Hal ini juga sejalan dengan tingkat pendidikan masyarakat di kecamatan ini, dimana sebagian besar dari jumlah penduduknya hanyalah tamatan SD dan banyak yang tidak tamat serta tidak bersekolah. Sedangkan yang memiliki pendidikan tamat SD sampai dengan sarjana hanya 17,6 %, bahkan untuk penduduk yang memiliki pendidikan D III dan sarjana masing-masingnya hanya satu orang saja.

4.3.3. Faktor Kebiasaan

Selanjutnya faktor yang menyebabkan Kecamatan ini menjadi Kecamatan yang rawan pangan adalah faktor Kebiasaan masyarakat itu sendiri. Mereka itu menurut para Key Informan mempunyai kebiaasaan hidup berpindah-pindah daan berpencar-pencar.

Hal inilah kemudian yang menjadikan pemerintah sulit untuk menetukan prioritas jalan yang akan dibuka apabila adanya bantuan dana dari pusat untuk membangun jalan. Kemudian sulit juga mau membuat prioritas membuat jaringan listrik dimana dan membuat tempat-tempat pendidikan dimana, karena dalam 1 Km itu paling hanya ada 2 RT disana dan jarak merekapun tidaklah berdekatan. Selain daripada kebiasaan hidup kebiasaan mereka bertani juga berpindah pindah, seperti yang diutarakan Bapak Sahat Panggaben Camat Kecamatan Siberut Utara, cara mereka bertani adalah dengan membuka suatu lahan, mereka manfaatkan, kemudian mereka tingglkan, padahal sudah pernah ada penyuluhan agar bertani tersebut dilakukan dengan cara menetap namun tidak mereka lakukan.

Faktor kebiasaan inilah yang cukup menghambat agar majunya masyarakat di daerah tersebut. Dinas kesehatan telah pernah melakukan program penampungan air bersih dengan menampung air hujan dengan tujuan mereka mau mencontoh nya dalam kehidupan sehari-hari, namun ternyata tidak, pernah juga dilakukan program pembangunan rumah sehat, tidak juga berjalan optimal. Kebiasaan hidup apa adanya inilah yang sangat sulit untuk dirubah, apa adanya dalam maksud, kalau mereka mau makan tinggal ambil sagu, mau makan ikan tinggal tangkap di laut, mau mandi ya langsung saja di laut, sehingga menimbulkan rasa cepat puas bagi diri mereka, cukup terpenuhi makan dan punya tempat tinggal saja bagi mereka sudah cukup.

Selanjutnya berkaitan dengan kebiasaan ini Bapak Umaruddin dari Dinas Pertanian juga mengatakan bahwa masyarakatnya juga punya kebiasaan malas karena mereka sudah terbiasa "senang". Senang dalam artian mereka itu punya hasil hutan yang bisa diambil dan digunakan secara turun temurun, sehingga menjadikan mereka agak malas untuk menanam tanaman pangan.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sebaran daerah Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagai berikut : Kecamatan Pagai Utara Selatan merupakan daerah yang sangat tahan pangan, Kecamatan Sipora dan Kecamatan Siberut Selatan adalah Kecamatan yang cukup rawan pangan, Kecamatan Siberut Utara merupakan Kecamatan yang sangat rawan pangan.

Adapun faktor penyebab Kecamatan Siberut Utara menjadi Kecamatan yang paling rawan pangan di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah karena faktor geografis dari daerah tersebut yang menjadikan pendayagunaan lahan tidak optimal dan mengakibatkan tidak sampai akses beupa kesehatan, jalan dan sebagainya ke masyarakat yang jauh dari Ibukota Kecamatan. Faktor lainnnya adalah faktor Sumberdaya manusianya yang umumnya berkualitas rendah dimana hal ini dikuatkan dengan tingkat pendidikan masyarakatnya yang sebagian besar hanya sampai SD saja, sedangkan yang tamat SLTP ke atas jumlahnya hanya 17,6 % dari total jumlah penduduk di sana. dan juga faktor Kebiasaan masyarakat di sana yang manjadi penghambat majunya daerah tersebut

5.2. Saran

1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana untuk meningkatkan aksesbilitas wilayah
2. Tinjau ulang bantuan bahan pangan berupa beras karena kurang sesuai dengan pola konsumsi masyarakat setempat, bantuan tersebut mungkin dapat dialihkan dalam bentuk uang atau berupa pangan sumber protein agar lebih membantu meningkatkan keseimbangan konsumsi (gizi).
3. Peningkatan pemberdayaan kelembagaan / program terkait pangan, gizi dan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Amang, B. dan M Husein, 1999. *Kebijakan Beras dan Pangan Nasional.* IPB Press, Bogor

Anonim (a). 2001. *Rencana Strategis dan Program Kerja Pemantapan Ketahanan Pangan Tahun 2000-2004.* Badan Bimas Ketahanan Pangan Departemen Pertanian, Jakarta

Anonim (a). 2002. *Peraturan Pemerintah RI No. 68 Tahun 2002.* Badan Bimas Ketahanan Pangan Departemen Pertanian, Jakarta.

Anonim (a). 2004. *Laporan Kinerja Badan Bimas Ketahanan Pangan Tahun 2004.* Badan Bimas Ketahanan Pangan Departemen Pertanian, Jakarta.

Anonim (b). 2002. *Kebijakan Umum Pemantapan Ketahanan Pangan Nasional.* Dewan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian, Jakarta.

Anonim (c). 2004. *Rencana Kebijakan dan Program Peningkatan Ketahanan Pangan.* Badan Keahanan Pangan Sumatera Utara, Medan.

Krisnamurthi, B. 2003. *Keanekaragaman Pangan: Pengalaman 40 Tahun dan Tantangan ke Depan.* www. http/Jurnal Ekonomi Rakyat. Htm.

Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian.* Ghalia Indonesia. Jakarta

Puwantini,Tri B, Mewa Ariani, Yuni Marisa.2002. *Analisis Kerawanan Pangan Wilayah (Studi Kasus : Nusa Tenggara Timur).* Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan kebijakan Pertanian, Bogor.

Saragih, B. 2001. *Suara dari Bogor Membangun Sistem Agribisnis.* Pustaka Wirausaha Muda, Bogor.

Saragih, B. 2001. *Pembangunan Pertanian 2001-2004.* Departemen Pertanian, Jakarta

Santoso, P.B. 2005. *Strategi Pengembangan Agribisnis Pangan.* Majalah Pangan Nomor 44/XIV/Januari 2005

Soekirman, dkk. 2004. *Ketahanan Pangan dan Gizi di Era Otonomi Daerah dan Globalisasi.* Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VII, Jakarta

Soetrisno, N. 2005. *Strategi Pembangunan Ketahanan Pangan.* Disampaikan dalam sinkronisasi operasional kegiatan Pembangunan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Tengah, Bandungan.

Suhardjo, dkk. 1986. *Pangan, Gizi dan Pertanian.* UI Press, Jakarta.

Sukirno, S. 1982. *Pengantar Teori Ekonomi Mikro.* Universitas Malaya Press, Kuala Lumpur

Suntoro,E. 2007. *Urgensi Penanganan Kerawanan Pangan.*

Suryana, A. 2001. *Tantangan dan kebijakan Ketahanan Pangan.* Makalah disampaikan pada Seminar nasional Pemberdayaan Masyarakat Untuk mencapai Ketahanan Pangan dan pemulihan Ekonomi.

Suyana, A. 2003. *Kapita Selekta Evolusi Pemikiran Kebijakan Ketahanan Pangan,* BPFE, Yogyakarta.

Tempo, 19 Agustus 2005. *100 Kabupaten Rawan Pangan.* Tempo interaktif, Jakarta

ampiran 1 : Kabupaten / Kota yang Termasuk Daerah Rawan Pangan

lo	Propinsi	Tahun 2001			Tahun 2002			Tahun 2003			Naik/Turun Rawan Pangan (%)
		Jml Kb/kt	Rawan pangan	%	Jml Kb/kt	Rawan Pangan	%	Jml Kb/kt	Rawan Pangan	%	
	DI Aceh	11	9	81,82	20	6	30,00	20	6	30,00	-
	Sumut	19	5	26,32	20	5	25,00	20	8	40,00	15,00
	Sumbar	14	4	28,57	15	1	6,67	15	2	13,33	6,67
	Sumsel	10	6	60,00	7	4	57,14	7	4	57,14	-
	Riau	15	4	26,67	16	5	31,25	16	5	31,25	-
	Jambi	6	2	33,10	10	6	60,00	10	4	40,00	(40,00)
	Bengkulu	4	1	25,00	4	2	50,00	4	2	50,00	-
	Lampung	10	3	30,00	10	4	40,00	10	4	40,00	-
	DKI	5	0	-	5	2	40,00	6	0	-	(40,00)
0	Jabar	28	7	25,00	24	7	29,17	25	5	20,00	(9,17)
1	Jateng	35	14	40,00	35	12	34,21	37	7	18,92	(15,29)
2	DI Jogya	5	1	20,00	5	2	40,00	5	1	20,00	(20,00)
3	Jatim	37	15	40,54	38	13	34,21	37	7	18,92	(15,29)
4	Bali	9	3	33,33	9	4	44,44	9	3	33,33	(11,11)
5	NTB	7	6	85,71	7	7	100,00	7	6	85,71	(14,39)
6	NTT	13	12	92,31	14	10	71,43	14	10	71,43	-
7	Kalbar	7	6	85,71	10	6	60,00	10	6	60,00	-
8	Kalteng	6	4	66,67	14	6	42,86	14	7	50,00	7,14
9	Kalsel	11	4	36,36	11	5	45,45	11	5	45,45	-
20	Kaltim	7	2	28,57	12	4	33,33	12	4	33,33	-
21	Sulut	6	4	57,14	5	4	80,00	5	4	80,00	-
22	Sulteng	5	2	40,00	9	5	55,56	9	6	66,67	11,11
23	Sulsel	24	12	50,00	24	13	54,17	24	12	50,00	(4,17)
24	Sultra	5	4	80,00	6	5	83,33	6	3	50,00	(33,33)
25	Maluku	5	2	40,00	5	1	30,00	5	1	20,00	-
26	Papua	13	9	69,23	14	7	50,00	14	10	71,43	21,43
27	Banten	6	3	50,00	6	2	33,33	6	2	33,33	-
28	Gorontalo	3	2	66,67	3	3	100,00	3	3	100,0	-
29	Babel	3	2	66,67	3	2	66,67	3	2	66,67	-
30	Maluku Utara	3	2	66,67	3	2	66,67	3	2	66,67	-
	Jumlah	333	150	45,05	364	155	42,58	365	145	39,73	(2,86)

umber : Laporan Kerja badan Bimas Ketahanan Pangan Departemen Pertanian Tahun 2004

Lampiran 2 : Data Indikator Kerawanan Pangan

No.	Kabupaten	Ketersediaan Pangan Pokok/Kapita/Hari (Gram)	Pddk Miskin (%).	Pddk Tanpa Akses Lisrtik (%)	Pddk Tanpa Akses Jalan (%)	RT > 5km Dari Puskesmas (%)	RT Tanpa Akses ke Air Bersih (%)	Umur Harpan Hidup (Tahun)	Berat Badan Balita di Bawah Standar (%)	Angka Kematin Bayi (Orang)	Perempuan Buta Huruf (%)
1	Pasaman	1.269,31	44,58	43,46	-	-	37,20	63,93	7,70	52,00.	5,42
2	Pasaman Barat	888,08	43,47	34,50	-	-	51,63	63,90	5,70	52,99	5,43
3	Lima Puluh Kota	1.013,53	23,70	29,81	-	-	32,58	68,79	3,20	33,12	2,94
4	A g a m	1.051,42	25,41	10,54	-	-	23,00	68,72	5,80	33,99	4,71
5	Tanah Datar	1.078,26	2122	16,24	-	-	27,87	68,72	3,00	34,77	5,22
6	Pdg.Pariaman	930,07	30,23	14,72	-	-	30,84	66,63	7,80	41,67	11,79
7	S o l o k	1.281,28	30,14	23,25	-	-	30,99	63,03	3,10	56,00	6,41
8	Solok Selatan	1.069,93	28,41	23,30	-	-	30,01	63,00	2,80	56,85	6,42
9	Sijunjung	670,18.	28,75	23,04	-	-	45,01	63,92	11,60	52,09	8,03
10	Dharmasraya	521,41	22,13	23.05	-	-	25,34	63,91	11,20	53,00	8,04
11	Pesisir Selatan	935,70	38,95	34.,69	-	-	30,15	67,43	2,40	38,36	10,01
12	Kep.Mentawai	87,67	80,13	38,14	-	-	56,20	67,84	10,10	36,70	9,18

Sumber : Badan Bimas Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat 2006

Lampiran 3 : Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kabupaten / Kota Tahun 2005

No	Kabupaten / Kota	Luas Wilayah (KM 2)	Jumlah Penduduk (Orang)		
			Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	Kab. Pasaman	4.447.63	122.969	121.585	244.554
2.	Kab. Pasaman Barat	3.387.77	158.737	158.186	316.923
3.	Kab. Lima Puluh Kota	3.354.30	159.488	164.713	324.201
4.	Kab. Agam	2.232.30	203.466	221.323	424.789
5.	Kab. Tanah Data	1.336.00	162.447	169.129	331.576
6.	Kab. Padang Pariaman	1.328,79	182.398	195.810	378.208
7.	Kab. Solok	3.738,00	169.382	173.548	342.930
8.	Kab. Solok Selatan	3.346,20	61.077	65.735	126.812
9.	Kab. Swl / Sijunjung	3.130,80	94.562	93.755	188.317
10.	Kab. Dhamasraya	2.961,13	84.049	81.145	165.194
11.	Kab. Pesisir Selatan	5.794,95	212.627	210.466	423.093
12.	Kab. Mentawai	6.011,35	34.398	30.142	64.540
13.	Kota Padang	694,96	394.008	405.733	799.741
14.	Kota Solok	57,64	26.361	27.688	54.049
15.	Kota Sawahlunto	273,45	26.239	26.842	53.081
16.	Kota padang Panjang	23,00	22.813	22.626	45.439
17.	Kota Bukittinggi	25,24	50.142	50.370	100.512
18.	Kota Payakumbuh	80,43	50.080	51.739	101.819
19	Kota Pariaman	73,36	33.727	36.305	70.032
	Jumlah	**42.297,30**	**2.248.970**	**2.306.840**	**4.555.810**

Sumber : BPS Propinsi Sumbar 2005

Lampiran 4: Indeks Komposit Kerawanan Pangan (IFI) Kabupaten tahun 2004.

No	Kabupaten	IAV	IFLA	IFU	IFV	IFI
1	Kepulauan Mentawai	1,000	0,630	0,713	0,278	0,655
2	Pesisir Selatan	0,039	0,481	0,575	0,371	0,367
3	Solok	0,000	0,672	0,304	0,272	0,312
4	Sawahlunto/sijunjung	0,078	0,659	0,555	0,453	0,436
5	Tanah Datar	0,019	0,018	0,256	0,513	0,201
6	Padang Pariaman	0,026	0,482	0,653	0,685	0,462
7	Agam	0,017	0,514	0,214	0,220	0,241
8	Lima Puluh Kota	0,024	0,539	0,219	0,511	0,323
9	Pasaman	0,015	0,527	0,439	0,308	0,322

Sumber : BBKP Sumbar (2005)

Keterangan:

IAV : Indeks Avaibility Food (Ketersediaan Pangan)

IFLA : Indeks Food Livelihood Acces (Akses terhadap pangan)

IFU : Indeks Food Utilization (Penyerapan terhadap Pangan)

IFV : Indeks Food Vulnerability (Kerentangan Pangan)

IFI : Indeks Food Insecurity (Kerawanan Pangan).

Lampiran 5. Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga dan Kepadatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2006

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah Rumah Tangga	Kepadatan / Km^2
1.	Pagai Utara Selatan	23.241	11.611	11.630	5.632	5,45 (5 RT/ Km^2)
2.	Sipora	14.280	7.902	6.378	4.048	3,74 (4 RT/ Km^2)
3.	Siberut Selatan	17.084	9.437	7.647	3.552	2,16 (2 RT Km^2/)
4.	Siberut Utara	15.291	7.563	7.728	2.960	1,51 (2 RT/ Km^2)
	Total	**70.436**	**36.513**	**33.923**	**16.192**	**2,69 (3 RT/ Km^2)**

Sumber : Bidang Bina Program Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2006

Lampiran 6

Tabel a : Produksi bersih Sagu Kabupaten Kepulauan MentawaiTahun 2004

No	Kecamatan	Produksi (Ton)	Jumlah Susut (Ton)	Produksi Bersih (Ton)	Produksi Sagu (konversi) (Ton)
1	2	3	4 (3 x 0,089)	5 (3 – 4)	6 (5 x 0,4)
1	Pagai Utara Selatan	23,00	2,047	20,953	8,381
2	Sipora	38,40	3,418	34,982	13,993
3	Siberut Selatan	28,40	2,528	28,872	11,549
4	Siberut Utara	19,20	1,709	17,491	6,996

Tabel b : Produksi bersih Sagu Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2005

No	Kecamatan	Produksi (Ton)	Jumlah Susut (Ton)	Produksi Bersih (Ton)	Produksi Sagu (konversi) (Ton)
1	2	3	4 (3 x 0,089)	5 (3 – 4)	6 (5 x 0,4)
1	Pagai Utara Selatan	23,00	2,047	20,953	8,381
2	Sipora	38,40	3,418	34,982	13,993
3	Siberut Selatan	28,40	2,528	28,872	11,549
4	Siberut Utara	19,20	1,709	17,491	6,996

Tabel c : Produksi bersih Sagu Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2006

No	Kecamatan	Produksi (Ton)	Jumlah Susut (Ton)	Produksi Bersih (Ton)	Produksi Sagu (konversi) (Ton)
1	2	3	4 (3 x 0,089)	5 (3 – 4)	6 (5 x 0,4)
1	Pagai Utara Selatan	11,00	0,979	10,021	4,008
2	Sipora	6,50	0,579	5,921	2,368
3	Siberut Selatan	57,60	5,126	52,474	20,989
4	Siberut Utara	40,00	3,56	36,44	22,576

Tabel d : Produksi bersih Pisang Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2004

No	Kecamatan	Produksi (Ton)	Jumlah Susut (Ton)	Produksi Bersih (Ton)	Produksi Sagu (konversi) (Ton)
1	2	3	4 (3 x 0,062)	5 (3 – 4)	6 (5 x 0,175)
1	Pagai Utara Selatan	120,88	7,495	113,385	19,842
2	Sipora	102,96	6,384	96,576	16,90
3	Siberut Selatan	110,04	6,822	103,218	18,063
4	Siberut Utara	126,12	7,819	118,301	20,703

Tabel e : Produksi bersih Pisang Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2005

No	Kecamatan	Produksi (Ton)	Jumlah Susut (Ton)	Produksi Bersih (Ton)	Produksi Sagu (konversi) (Ton)
1	2	3	4 (3 x 0,062)	5 (3 – 4)	6 (5 x 0,175)
1	Pagai Utara Selatan	162,00	10,044	151,956	26,592
2	Sipora	153,00	9,486	143,514	25,115
3	Siberut Selatan	134,44	8,335	126,105	22,068
4	Siberut Utara	126,48	7,842	118,638	20,762

Tabel f : Produksi bersih Pisang Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2006

No	Kecamatan	Produksi (Ton)	Jumlah Susut (Ton)	Produksi Bersih (Ton)	Produksi Sagu (konversi) (Ton)
1	2	3	4 (3 x 0,062)	5 (3 – 4)	6 (5 x 0,175)
1	Pagai Utara Selatan	114,64	7,108	107,532	18,818
2	Sipora	111,52	6,914	104,606	18,306
3	Siberut Selatan	111,20	6,894	104,306	18,20
4	Siberut Utara	105,75	6,557	99,193	17,359

Tabel g : Produksi bersih Keladi Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2004

No	Kecamatan	Produksi (Ton)	Jumlah Susut (Ton)	Produksi Bersih (Ton)	Produksi Sagu (konversi) (Ton)
1	2	3	4 (3 x 0,078)	5 (3 – 4)	6 (5 x 0,263)
1	Pagai Utara Selatan	8,80	0,686	8,114	2,134
2	Sipora	9,80	0,764	7,487	1,969
3	Siberut Selatan	9,60	0,749	8,851	2,328
4	Siberut Utara	10,70	0,835	8,935	2,35

Tabel h : Produksi bersih Keladi Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2005

No	Kecamatan	Produksi (Ton)	Jumlah Susut (Ton)	Produksi Bersih (Ton)	Produksi Sagu (konversi) (Ton)
1	2	3	4 (3 x 0,078)	5 (3 – 4)	6 (5 x 0,263)
1	Pagai Utara Selatan	8,60	0,671	7,929	2,085
2	Sipora	8,86	0,691	8,169	2,148
3	Siberut Selatan	8,46	0,66	7,8	2,051
4	Siberut Utara	8,2	0,64	7,56	1,988

Tabel i : Produksi bersih Keladi Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2006

No	Kecamatan	Produksi (Ton)	Jumlah Susut (Ton)	Produksi Bersih (Ton)	Produksi Sagu (konversi) (Ton)
1	2	3	4 (3 x 0,078)	5 (3 – 4)	6 (5 x 0,263)
1	Pagai Utara Selatan	8,30	0,647	7,653	2,013
2	Sipora	9,56	0,746	7,132	1,876
3	Siberut Selatan	8,60	0,671	7,929	2,085
4	Siberut Utara	7,90	0,616	7,284	1,916

Tabel j : Produksi bersih Padi dan Beras Kabupaten Tahun 2004

No	Kecamatan	Produksi (GKG) (ton)	Susut			Jumlah Susut (GKG) (Ton)	Produksi Bersih (GKG) (Ton)	Produksi Beras (Konversi) (Ton)
			Benih (GKG) (Ton)	Pakan (GKG) (Ton)	Tercecer (GKG) (Ton)			
1	2	3	4(3x0,03901)	5(3x0,002)	6(3x0,0054)	7(4+5+6)	8(3-7)	9(8x0,632)
1	Pagai Utara Selatan	537,6	20,97	1,075	2,903	24,948	512,652	323,996
2	Sipora	1.176	45,876	2,352	6,350	54,578	1.121,422	708,739
3	Siberut Selatan	193,5	7,548	0,387	1,045	8,98	184,52	116,616
4	Siberut Utara	271,4	10,587	0,543	1,466	12,596	258,804	163,564

Tabel k : Produksi bersih Padi dan Beras Kabupaten Tahun 2005

No	Kecamatan	Produksi (GKG) (ton)	Susut			Jumlah Susut (GKG) (Ton)	Produksi Bersih (GKG) (Ton)	Produksi Beras (Konversi) (Ton)
			Benih (GKG) (Ton)	Pakan (GKG) (Ton)	Tercecer (GKG) (Ton)			
1	2	3	4(3x0,03901)	5(3x0,002)	6(3x0,0054)	7(4+5+6)	8(3-7)	9(8x0,632)
1	Pagai Utara Selatan	166,6	6,499	0,333	0,899	7,731	158,869	100,405
2	Sipora	622	20,363	1,044	2,819	24,226	497,774	314,593
3	Siberut Selatan	224,4	8,754	0,449	1,212	10,415	213,985	135,239
4	Siberut Utara	198	7,724	0,396	1,069	9,189	188,811	119,329

Tabel l : Produksi bersih Padi dan Beras Kabupaten Tahun 2006

No	Kecamatan	Produksi (GKG) (ton)	Susut			Jumlah Susut (GKG) (Ton)	Produksi Bersih (GKG) (Ton)	Produksi Beras (Konversi) (Ton)
			Benih (GKG) (Ton)	Pakan (GKG) (Ton)	Tercecer (GKG) (Ton)			
1	2	3	4(3x0,03901)	5(3x0,002)	6(3x0,0054)	7(4+5+6)	8(3-7)	9(8x0,632)
1	Pagai Utara Selatan	1.459,2	56,923	2,918	7,879	67,72	1.391,48	879,415
2	Sipora	742,2	29,07	1,484	4,008	34,562	707,638	447,227
3	Siberut Selatan	352,4	13,747	0,705	1,903	16,355	336,045	212,380
4	Siberut Utara	360,6	14,067	0,721	1,947	16,735	344,865	217,323

Tabel m : Produksi bersih Jagung Kabupaten Tahun 2004

No	Kabupaten	Produksi Jagung (Ton)	Susut			Jumlah Susut (Ton)	Produksi Bersih (Ton)	Produksi Jagung Konversi
			Benih (Ton)	Pakan (Ton)	Tercecer (Ton)			
1	2	3	4(3x0,02655)	5(3x0,006)	6(3x0,005)	7(4+5+6)	8(3-7)	9(8x0,6)
1	Pagai Utara Selatan	40	1,062	0,24	0,2	1,502	38,498	23,099
2	Sipora	20,8	0,552	0,125	0,104	0,781	20,019	12,011
3	Siberut Selatan	323,4	8,586	1,940	1,617	12,143	311,257	186,754
4	Siberut Utara	102	2,708	0,612	0,51	3,83	98,17	58,902

Tabel n : Produksi bersih Jagung Kabupaten Tahun 2005

No	Kabupaten	Produksi Jagung (Ton)	Susut			Jumlah Susut (Ton)	Produksi Bersih (Ton)	Produksi Jagung Konversi
			Benih (Ton)	Pakan (Ton)	Tercecer (Ton)			
1	2	3	4(3x0,02655)	5(3x0,006)	6(3x0,005)	7(4+5+6)	8(3-7)	9(8x0,6)
1	Pagai Utara Selatan	9,6	0,255	0,058	0,048	0,361	9,239	5,543
2	Sipora	21	0,558	0,126	0,105	0,789	20,211	12,127
3	Siberut Selatan	17,4	0,462	0,104	0,087	0,653	16,747	10,048
4	Siberut Utara	5,4	0,143	0,032	0,027	0,202	5,198	3,119

Tabel o : Produksi bersih Jagung Kabupaten Tahun 2006

No	Kabupaten	Produksi Jagung (Ton)	Susut			Jumlah Susut (Ton)	Produksi Bersih (Ton)	Produksi Jagung Konversi
			Benih (Ton)	Pakan (Ton)	Tercecer (Ton)			
1	2	3	4(3x0,02655)	5(3x0,006)	6(3x0,005)	7(4+5+6)	8(3-7)	9(8x0,6)
1	Pagai Utara Selatan	6,3	0,167	0,038	0,033	0,238	6,062	3,637
2	Sipora	6,6	0,175	0,039	0,03	0,244	6,356	3,814
3	Siberut Selatan	4	0,106	0,024	0,02	0,15	3,85	2,31
4	Siberut Utara	2	0,053	0,012	0,01	0,075	1,925	1,155

Tabel p : Produksi bersih Ubi Kayu Kabupaten Tahun 2004

No	Kecamatan	Produksi Ubikayu (Ton)	Susut		Jumlah Susut (Ton)	Produksi Bersih (Ton)	Produksi Ubikayu Konversi
			Pakan (Ton)	Tercecer (Ton)			
1	2	3	4(3x0,002)	5(3x0,013)	6(4+5)	7(3-6)	8(7x0,28)
1	Pagai Utara Selatan	89,6	0,179	1,165	1,344	88,256	24,712
2	Sipora	169,4	0,339	2,202	2,541	166,859	46,721
3	Siberut Selatan	122,4	0,245	1,591	1,836	120,564	33,758
4	Siberut Utara	100,8	0,202	1,31	1,512	99,288	27,801

Tabel q : Produksi bersih Ubi Kayu Kabupaten Tahun 2005

No	Kecamatan	Produksi Ubikayu (Ton)	Susut		Jumlah Susut (Ton)	Produksi Bersih (Ton)	Produksi Ubikayu Konversi
			Pakan (Ton)	Tercecer (Ton)			
1	2	3	4(3x0,002)	5(3x0,013)	6(4+5)	7(3-6)	8(7x0,28)
1	Pagai Utara Selatan	81,6	0,163	1,061	1,224	80,376	22,505
2	Sipora	155,4	0,311	2,02	2,331	153,069	42,859
3	Siberut Selatan	92	0,184	1,196	1,38	90,62	25,374
4	Siberut Utara	42	0,084	0,546	0,63	41,37	11,584

Tabel r : Produksi bersih Ubi Kayu Kabupaten Tahun 2006

No	Kecamatan	Produksi Ubikayu (Ton)	Susut		Jumlah Susut (Ton)	Produksi Bersih (Ton)	Produksi Ubikayu Konversi
			Pakan (Ton)	Tercecer (Ton)			
1	2	3	4(3x0,002)	5(3x0,013)	6(4+5)	7(3-6)	8(7x0,28)
1	Pagai Utara Selatan	71,4	0,143	0,928	1,071	70,329	19,692
2	Sipora	66,6	0,133	0,866	0,999	65,601	18,368
3	Siberut Selatan	36,8	0,074	0,478	0,552	36,248	10,149
4	Siberut Utara	25,2	0,05	0,33	0,38	24,82	6,949

Tabel s : Produksi bersih Umbi-umbian Kecamatan Tahun 2004, 2005 dan 2006

No	Kabupaten	Produksi Bersih Umbi-Umbian (Ton)			Rata-Rata
		2004	2005	2006	
1	Pagai Utara Selatan	54,352	45,031	66,128	55,170
2	Sipora	98,097	89,295	67,175	84,856
3	Siberut Selatan	106,08	82,085	40,579	76,248
4	Siberut Utara	62,776	26,404	29,475	59,328

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Lampiran 7

Penghitungan I_{AV} masing-masing Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai

Rumus : $I_{AV} = \dfrac{\text{Ratio konsumsi Kecamatan - Ratio konsumsi minimal}}{\text{Ratio konsumsi maksimal - Ratio konsumsi minimal}}$

1. I_{AV} Pagai Utara Selatan $= \dfrac{4{,}789 - 2{,}617}{5{,}958 - 2{,}617} = 0{,}65$

2. I_{AV} Sipora $= \dfrac{2{,}617 - 2{,}617}{5{,}958 - 2{,}617} = 0{,}000$

3. I_{AV} Siberut Selatan $= \dfrac{5{,}557 - 2{,}617}{5{,}958 - 2{,}617} = 0{,}879$

4. I_{AV} Siberut Utara $= \dfrac{5{,}958 - 2{,}617}{5{,}958 - 2{,}617} = 1{,}000$

Lampiran 8

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Persentase (%)
1.	Pagai Utara Selatan	3.283	14,12
2.	Sipora	2.653	17,90
3.	Siberut Selatan	2.957	17,31
4.	Siberut Utara	2.991	19,56

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat 2006

Lampiran 9

Banyaknya Pelanggan (Rumah Tangga) Yang mendapat aliran PLN Tahun 2006

No	Kecamatan	Banyak Desa	Banyak Pelanggan	Rumah Tangga belum Teraliri
1.	Pagai Utara Selatan	10	1.062	4.570
2.	Sipora	13	1.170	2.878
3.	Siberut Selatan	10	649	2.903
4.	Siberut Utara	10	244	2.716
	Jumlah		**3.125**	**13.067**

Sumber : PLN Ranting Kabupaten Kepulauan Mentawai

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Lampiran 10

Jumlah Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten kepulauan Mentawai tahun 2006

No	Kecamatan	Pesisir	Bukan Pesisir				Jumlah Total
			Lembah/ Daerah aliran Sungai	Lereng Bukit	Dataran	Jumlah	
1.	Pagai Utara Selatan	10	0	0	0	0	10
2.	Sipora	8	2	3	0	5	13
3.	Siberut Selatan	7	2	1	0	3	10
4.	Siberut Utara	4	3	1	2	6	10
	Total	**29**	**7**	**5**	**2**	**14**	**43**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Lampiran 11

Banyaknya Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih

No	Kecamatan	Rumah Tangga Tanpa Akses air Bersih
1.	Pagai Utara Selatan	420
2.	Sipora	369
3.	Siberut Selatan	336
4.	Siberut Utara	242
	Jumlah	**1357**

Sumber : Bidang P2MPL Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat tahun 2006

Lampiran 12

Status Berat Badan Balita Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2006

No	Kecamatan	Jumlah Balita			% BGM
		Ditimbang	BB Naik	BGM	
1.	Pagai Utara Selatan	909	469	21	2,31
2.	Sipora	827	378	61	7,37
3.	Siberut Utara	671	330	18	2,68
4.	Siberut Utara	528	235	36	6,82

Sumber : Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Lampiran 13

Jumlah Kelahiran dan Kematian Bayi Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2006

No	Kecamatan	Jumlah Kelahiran (jiwa)	Jumlah Lahir Mati (jiwa)	Jumlah Bayi Mati (jiwa)	Total Bayi Mati (jiwa)
1.	Pagai Utara Selatan	608	4	13	17
2.	Sipora	299	0	8	8
3.	Siberut Selatan	310	1	3	4
4	Siberut Utara	207	4	8	12

Sumber : Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat

Lampiran 14

Persentase Penggunaan Lahan Menurut Jenis Penggunaannya di Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2006

No	Jenis Penggunaan	Luas / Area (Ha)	Persentase (Ha)
1.	Pemukiman	967,92	0,49
2.	Sawah	49,56	0,03
3.	Tegalan	9,55	0,00
4.	Kebun Campuran	26.193,16	13,33
5.	Perkebunan	-	-
6.	Hutan	135.055,81	68,73
7.	Semak Bellukar	13.467,01	6,85
8.	Kolam	52,59	0,04
9.	Lain-Lain	20.699,40	10,53
	Jumlah / Total	**196.495,00**	**100,00**

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Mentawai (Publikasi BPS)

Lampiran 15

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi dan Jenis Kelamin Di Kecamatan Siberut Utara Kabupaten kepulauan Mentawai tahun 2006

No	Tingkat Pendidikan Tertinggi	Jenis Kelamin		Penduduk
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Tidak / belum sekolah	1.549	1.455	2.904
2.	Tidak Tamat SD	1.700	2.160	3.860
3.	Tamat SD	3.156	2.677	5.834
4.	SLTP Sederajat	789	574	1.362
5.	SLTA Sederajat	774	433	1.206
6.	Diploma J / II	65	58	123
7.	D III / Akademi	1	0	1
8.	S1 / D IV	1	0	1
9.	S 2	0	0	0
10.	S3	0	0	0
	Jumlah / Total	**7.563**	**7.287**	**15.291**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten kepulauan Mentawai